

ABSTRAK

NUR WILDAN SAFRUDIN, *MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG (Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 - 2025)*, Skripsi. Jakarta: Program Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menemukan jejak sejarah transmigrasi orang Bali Islam yang ada di Desa Sakti Buana Lampung Tengah (2) Mendapatkan fakta kondisi sosial dan geografis masyarakat Bali Islam Desa Sakti Buana Lampung Tengah (3) Menjelaskan proses awal terjadinya transmigrasi orang Bali Islam di Desa Sakti Buana Lampung Tengah (4) Mengetahui bentuk geografis masyarakat (Kampung Bali Islam) di Desa Sakti Buana Lampung Tengah.

Simpulan penelitian ini adalah: (1) Masyarakat Bali Islam di Desa Sakti Buana Lampung Tengah terbentuk dari proses transmigrasi dari Pulau Bali ke Desa Sakti Buana Lampung Tengah yang disebabkan adanya faktor meletusnya gunung Agung dan program transmigrasi dari pemerintah pusat pada tahun 1956 sampai 1997. (2) Kondisi geografis wilayah Desa Sakti Buana yang agraris, menjadikan profesi masyarakatnya mayoritas dalam bidang pertanian, hal tersebut mempengaruhi karakteristik sosial masyarakat Desa Sakti Buana, yang hidup dalam kesederhanaan, toleransi, dan harmonis. (3) Transmigrasi yang terdapat di Desa Sakti Buana Lampung Tengah menjadi berbeda dikarenakan terdapat satu kampung yang dihuni oleh orang Islam yang ber Suku Bali yang beragama Islam.

Kata Kunci: Transmigrasi, Desa Sakti Buana, Masyarakat Bali Islam, Islam Lampung.

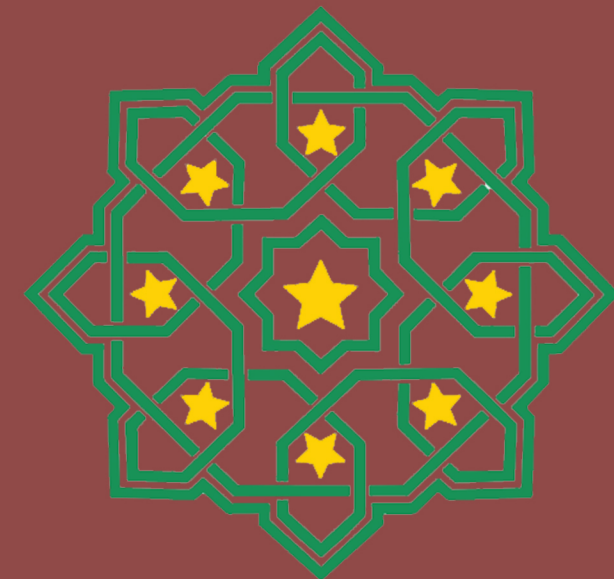
2025

MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG
(Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 - 2025)

Nur Wildan Safrudin

MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG (Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 - 2025)

Nur Wildan Safrudin
2022002



UNUSIA

MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG
(Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung
Pada Tahun 1956 - 2025)

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Dalam Bidang Sejarah Peradaban Islam (S.Hum)



Oleh:

Nama : Nur Wildan Safrudin

NIM : 2022002

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ISLAM NUSANTARA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG (Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 - 2025)” yang disusun oleh Nur Wildan Safrudin (2022002) Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah disetujui untuk diujikan ke siding Skripsi.

Jakarta, 23 April 2025

Menyetujui,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several horizontal strokes below it.

Dr. Ayatullah, M. UD

(2112068002)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG (Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 - 2025)” yang disusun oleh Nur Wildan Safrudin (2022002) Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat perolehan gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Jakarta, 04 September 2025

Dekan,



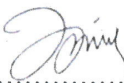
Dr. Ahmad Suaedy, M.A.Hum.

TIM PENGUJI:

1. Fuadul Umam, M.Hum

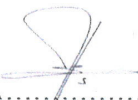

(.....)

2. Alanuari, M.A


(.....)

PEMBIMBING:

1. Dr. Ayatullah, M.Ud.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah:

Nama : NUR WILDAN SAFRUDIN

NIM : 2022002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG (Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 - 2025)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan.

Jakarta, 04 September 2025



10000
SERBUK MIBU RUPIAH
MATERAI
TEMPEL
9BALXQ74770575

Nur Wildan Safrudin

2022002

KATA PENGANTAR

Segala puji tertuju kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pencipta semesta alam, yang telah memberikan karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dengan sukses. *Sholawat* dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang mengemban risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam program studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang dengan seluruh perjuangan, do'a serta restunya dapat mengantarkan penulis pada jenjang pendidikan strata satu. Tiada balasan yang terkira selain bentuk bakti kepada orang tua dan semoga senantiasa Allah SWT memberkasih keduanya.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ayatullah, M.Ud., atas bimbingan, panduan, dan masukan berharga yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan beliau, skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dosen pengajar di program studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2020 yang dengan mereka telah mengukir kisah bersama, segala suka dan duka yang kita lalui bersama telah menjadi kenangan yang berharga.

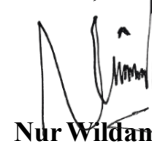
Berikutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Himpunan Santri Alumni Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro Zona Jawa (Jakarta), terutama kepada Bapak Taufiq Kurohman, Ibu Ratih, Bapak Ahmad Muhtarom, Bapak Faizun yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kyai Marsudi Syuhud dan Ibu Nyai Mufizah selaku pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta, dari awal kuliah 2020 saya mondok di tempat beliau dan semoga ilmu yang saya dapatkan berkah manfaat.

Terakhir, kepada teman-teman Organisasi UKM Pencak Silat UNUSIA 2021-2025: Mas Irham, Bapak Ulin Nuha, Cak Munir, Mbak Astari, Mbak Iin, Kang Munadi, Khabib, Lingga, Yeyen, Ridho, dan Yolan. Terima kasih telah bersabar selama saya memimpin dan semoga Organisasi tersebut selalu diberikan kemudahan dan masyhur.

Memasuki akhir tulisan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki ruang untuk diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengundang pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, demi meningkatkan kualitas di masa depan. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks Sejarah Peradaban Islam. Semog Allah senantiasa memberkahi langkah kita dalam menuju jalan kebenaran. Aamiin.

Jakarta, 14 Juli 2025



Nur Wildan Safrudin

2022002

ABSTRACT

NUR WILDAN SAFRUDIN, *BALINESE MUSLIM COMMUNITY IN LAMPUNG (Transmigration of Balinese Muslims in Sakti Buana Village, Lampung, 1956 – 2025)*, Thesis. Jakarta: Islamic Civilization History Program, Faculty of Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama University of Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025.

This research aims to (1) Find historical traces of the transmigration of Balinese Muslims in Sakti Buana Village, Central Lampung (2) Obtain facts about the social and geographical conditions of the Balinese Muslim community in Sakti Buana Village, Central Lampung (3) Explain the initial process of the transmigration of Balinese Muslims in Sakti Buana Village, Central Lampung (4) Find out the geographical form of the community (Balinese Islamic Village) in Sakti Buana Village, Central Lampung.

The conclusion of this study is: (1) The Balinese Islamic community in Sakti Buana Village, Central Lampung was formed from the transmigration process from Bali Island to Sakti Buana Village, Central Lampung, which was caused by the eruption of Mount Agung and the transmigration program from the central government in 1956 to 1997. (2) The geographical conditions of the Sakti Buana Village area, which is agrarian, make the majority of its people work in agriculture, this affects the social characteristics of the Sakti Buana Village community, who live in simplicity, tolerance, and harmony. (3) The transmigration in Sakti Buana Village, Central Lampung is different because there is one village inhabited by Balinese Muslims who are Muslim.

Keywords: Transmigration, Sakti Buana Village, Balinese Islamic Community, Lampung Islam.

ABSTRAK

NUR WILDAN SAFRUDIN, *MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG (Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 - 2025)*, Skripsi. Jakarta: Program Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menemukan jejak sejarah transmigrasi orang Bali Islam yang ada di Desa Sakti Buana Lampung Tengah (2) Mendapatkan fakta kondisi sosial dan geografis masyarakat Bali Islam Desa Sakti Buana Lampung Tengah (3) Menjelaskan proses awal terjadinya transmigrasi orang Bali Islam di Desa Sakti Buana Lampung Tengah (4) Mengetahui bentuk geografis masyarakat (Kampung Bali Islam) di Desa Sakti Buana Lampung Tengah.

Simpulan penelitian ini adalah: (1) Masyarakat Bali Islam di Desa Sakti Buana Lampung Tengah terbentuk dari proses transmigrasi dari Pulau Bali ke Desa Sakti Buana Lampung Tengah yang disebabkan adanya faktor meletusnya gunung Agung dan program transmigrasi dari pemerintah pusat pada tahun 1956 sampai 1997. (2) Kondisi geografis wilayah Desa Sakti Buana yang agraris, menjadikan profesi masyarakatnya mayoritas dalam bidang pertanian, hal tersebut mempengaruhi karakteristik sosial masyarakat Desa Sakti Buana, yang hidup dalam kesederhanaan, toleransi, dan harmonis. (3) Transmigrasi yang terdapat di Desa Sakti Buana Lampung Tengah menjadi berbeda dikarenakan terdapat satu kampung yang dihuni oleh orang Islam yang ber Suku Bali yang beragama Islam.

Kata Kunci: Transmigrasi, Desa Sakti Buana, Masyarakat Bali Islam, Islam Lampung.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Pertanyaan Penelitian	8
1.4. Batasan Masalah Penelitian	9
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.6.1. Kegunaan Teoritis	10
1.6.2. Kegunaan Praktis	10
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI.....	12
2.1. Kerangka Teori	12
2.1.1. Konsep Transmigrasi	12
2.1.2. Konsep Islam Nusantara	28
2.1.3. Konsep Bali Islam Lampung.....	39
2.2. Kerangka Pemikiran	43
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Jenis Penelitian	49
3.2. Sumber Data	51

3.2.1.	Sumber Primer	51
3.2.2.	Sumber Sekunder	52
3.2.3.	Sumber Tersier	53
3.3.	Teknik Pengumpulan Data	54
3.4.	Teknik Analisis Data.....	54
3.4.1.	Analisis Komparatif	54
3.4.2.	Interpretasi Data	55
BAB IV HASIL PEMBAHASAN		56
4.1.	Proses Transmigrasi Masyarakat Bali Islam di Lampung	56
4.2.	Kebudayaan Masyarakat Bali Islam di Lampung	72
4.2.1.	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Masyarakat Lampung Barat	72
4.2.2.	Adat Istiadat Umat Beragama di Lampung.....	74
4.3.	Ekonomi Masyarakat Islam Lampung	77
BAB V PENUTUP.....		79
5.1.	Kesimpulan	79
5.2.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		86
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....		87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Budaya, ras, etnis, kepercayaan, agama, dan bahasa Indonesia sangat beragam. Bangsa Indonesia sangat beragam, seperti yang ditunjukkan oleh semboyan nasional "Bhinneka Tunggal Ika", yang menunjukkan bahwa orang-orangnya tetap satu kesatuan meskipun mereka beragam. Pluralitas tidak hanya merupakan ciri khas bangsa, tetapi juga membantu memperkuat identitas dan meningkatkan dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Nurlaili, 2024). Meskipun terdapat perbedaan agama dan budaya di Indonesia, cara berfikir dan bertindak laku merupakan hasil dari budaya melalui pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh masyarakat sekitar.

Program mobilitas penduduk yang dikenal sebagai migrasi bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah dengan tingkat kepadatan tinggi ke daerah yang relatif masih jarang penduduknya. Program ini biasanya dirancang dan dibiayai oleh pemerintah karena alasan strategis seperti kepentingan nasional. Dalam praktiknya, transmigrasi sebagian besar berfokus pada penduduk yang pindah dari wilayah asalnya seperti Jawa, Bali, dan Lombok ke wilayah permukiman baru yang dibangun di luar pulau-pulau tersebut. (Nurlaili, 2024). Dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ialah merupakan program transmigrasi.

Komunitas Etnis Bali di Kecamatan Seputih Mataram mengalami proses migrasi yang kompleks dan berlangsung lama. Dalam memulai kehidupan baru, perbedaan sosial, budaya, dan geografis antara daerah asal dan tujuan menimbulkan tantangan besar. Perubahan sosial ini memengaruhi kehidupan transmigran. Salah satu komponen utama yang memengaruhi perubahan ini adalah pergeseran struktur sosial, terutama sistem kasta. Pergeseran ini menyebabkan gaya hidup orang Bali di kawasan transmigrasi Lampung Tengah berbeda dengan gaya hidup mereka di tempat asal mereka. Faktor penyebab perubahan sosial tersebut yakni (1) Komunikasi antar kasta yang terjadi

harmonis sebagai wujud rasa senasib sepenanggungan sesama transmigran asal Bali sehingga tidak ada lagi batasan-batasan antar kasta; (2) Lingkungan perkampungan Bali di Seputih Mataram bersinggungan dengan perkampungan Jawa dan terjadi interaksi yang positif di antara kedua etnis tersebut; (3) Kebijakan pemerintah yang tidak membedakan kasta dalam pembagian fasilitas (semisal yang dibagikan seluas tanah 2 hektar) kepada para peserta transmigran dari etnis Bali sehingga pada awal kedatangannya di Lampung Tengah tidak ada perbedaan yang signifikan dari segi kesejahteraan; (4) Terdapat kesulitan yang dirasakan para Transmigran jika mereka harus mengikuti adat seperti Bali asal sebagai contoh perubahan sistem perkawinan. (Margana, 2017)

Transmigrasi di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari seratus tahun, dimulai sejak tahun 1905. Karena program ini terus menjadi kebijakan pemerintah hingga saat ini, itu menunjukkan tingkat keberlanjutan yang cukup besar (Legiani, 2018). Sejarah transmigrasi ini sangatlah panjang, bahwa inilah bukti bahwa transmigrasi diperlukan bagi Indonesia, untuk membangun negeri berkepulauan.

Program transmigrasi di Indonesia telah mengalami berbagai tahapan historis. Tahap awal dilaksanakan antara tahun 1905 hingga 1931 sebagai fase uji coba. Selanjutnya, pada periode 1931–1941, program ini diarahkan untuk merelokasi penduduk dari Pulau Jawa ke daerah-daerah di luar Jawa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah. Pada masa pra-kemerdekaan, program ini dikenal dengan istilah kolonisasi. Selama masa pendudukan Jepang, pelaksanaan transmigrasi mengalami penghentian sementara dan baru kembali dirancang pada tahun 1948 melalui sebuah rencana besar yang dicetuskan oleh A.H.O. Tambunan, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Jawatan Transmigrasi Nasional. Ia mengusulkan pemindahan sekitar 48 juta jiwa dalam kurun waktu 35 tahun. Akan tetapi, target tersebut dianggap tidak realistis, terutama karena situasi nasional pascakemerdekaan yang masih belum stabil. Pelaksanaan program ini pun jauh dari ekspektasi; data menunjukkan bahwa pada tahun 1950 hanya 77 orang yang diberangkatkan, meningkat

menjadi 17.605 orang pada tahun 1952, dan mencapai 40.009 orang pada tahun 1953, meskipun target untuk tahun tersebut mencapai sekitar satu juta orang (Margana, 2017).

Masuknya Islam ke Pulau Bali dapat ditelusuri sejak abad ke-15 Masehi, tepatnya pada masa pemerintahan Kerajaan Gelgel di bawah kepemimpinan Dalem Ketut Nglesir. Jejak historis keberadaan Islam di Bali juga tampak dari sejumlah prasasti serta bangunan penting di lingkungan istana, termasuk penggunaan aksara Arab pada cap resmi Kerajaan Klungkung. Fenomena ini berkaitan dengan era kepemimpinan Raja Ida Bagus Jambe, ketika kerajaan tersebut menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Islam di Jambi. Selain itu, para sejarawan juga mengidentifikasi keberadaan masjid-masjid tua dan makam-makam kuno milik tokoh-tokoh Islam, yang kini dikenal sebagai Wali Pitu di Bali. (Rinaldi Permana Putra, 2023)

Sejarah keberadaan suku Lampung dapat ditelusuri sejak masa pengaruh Hindu-Animisme yang berlangsung dari awal Masehi hingga permulaan abad ke-16. Yang dimaksud dengan era Hindu dalam konteks ini adalah masa masuk dan berkembangnya ajaran-ajaran serta sistem kebudayaan yang berasal dari daratan India, termasuk unsur-unsur Buddhisme, yang jejaknya masih terlihat dalam tradisi dan adat masyarakat Lampung. Sementara itu, agama Islam diperkirakan mulai memasuki wilayah Lampung sekitar abad ke-15 melalui tiga jalur utama. Jalur pertama berasal dari arah barat, yaitu dari Minangkabau, yang masuk melalui daerah dataran tinggi Belalau. Jalur kedua berasal dari wilayah utara, yakni dari Palembang melalui daerah Komering pada awal abad ke-15, atau paling tidak pada masa kekuasaan Adipati Arya Damar sekitar tahun 1443. Jalur ketiga berasal dari Banten, dibawa oleh Fatahillah (Sunan Gunung Jati), yang memasuki wilayah Labuhan Meringgai—yakni Keratuan Pugung—sekitar tahun 1525, sebelum penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1526. Dari pernikahan Fatahillah dengan Putri Sinar Alam, putri Ratu Pugung, lahirlah Minak Kejala Ratu yang kemudian menjadi leluhur dari Keratuan Daerah Putih, yang juga menurunkan tokoh Raden Intan. Oleh karena itu, jalur kedatangan

Islam yang paling berpengaruh di Lampung diyakini berasal dari arah Banten. (Ninik Junaidah, 2008).

Provinsi Lampung telah lama menjalin interaksi dengan berbagai wilayah lain di Nusantara. Ketika pengaruh Islam mulai menguat, Kesultanan Banten dan Palembang secara bergantian memasuki wilayah Lampung guna menyebarkan ajaran Islam. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, khususnya sejak abad ke-19, Lampung ditetapkan sebagai wilayah tujuan program kolonisasi, yaitu dengan mendatangkan penduduk dari Pulau Jawa ke wilayah ini. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia pascakemerdekaan melalui program transmigrasi. Transformasi dari kolonisasi menjadi transmigrasi menjadikan Lampung sebagai daerah dengan tingkat heterogenitas budaya yang tinggi. Oleh karena itu, Lampung sering dijuluki sebagai "Indonesia mini" karena struktur sosial budayanya yang merepresentasikan keragaman etnis dan budaya di Indonesia. (Aan budianto, 2024).

Sehingga menghasilkan sintesis yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal. Pada tahun 1952, pemerintah dengan kebijakan transmigrasi membuka jalan hidup baru bagi suku Bali di Nusa Penida. Masyarakat etnis Nusa Penida bertransmigrasi menuju pulau-pulau yang dijadikan target sasaran transmigrasi. Untuk provinsi Lampung, etnis Nusa Penida menempati wilayah Lampung Selatan tepatnya di Desa Sidomulyo dan Desa Balinuraga, Kabupaten Kalianda. (Ata & Ekomadyo, 2018) Keberadaan masyarakat Bali di Provinsi Lampung berawal dari pelaksanaan program transmigrasi yang digagas oleh pemerintah pusat pada dekade 1950-an. Kelompok pertama masyarakat Bali tiba di wilayah Lampung pada tahun 1952 dan mulai menetap di daerah Lampung Utara serta Lampung Timur. Gelombang transmigrasi berikutnya terjadi pada tahun 1962, bertepatan dengan peristiwa meletusnya Gunung Agung di Bali, yang menyebabkan meningkatnya jumlah transmigran asal Bali. Pada fase ini, mereka ditempatkan di wilayah Lampung Selatan, termasuk di Desa Balinuraga. Pada masa Orde Baru, transmigrasi menjadi salah satu program nasional strategis yang dirancang untuk mengatasi persoalan

kependudukan di Indonesia. Program ini disusun secara menyeluruh, mencakup tahapan perencanaan hingga pembinaan, dengan tujuan utama menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. (Utami, 2012)

Ketika program transmigrasi dilaksanakan pada tahun 1963 di wilayah Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, kawasan tersebut telah dihuni oleh beragam kelompok etnis, seperti masyarakat Lampung, Semende, Ogan, Jawa, Sunda, dan Banten, yang umumnya berprofesi sebagai petani ladang. Kedatangan komunitas Bali ke wilayah ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan identitas keagamaan masyarakat Bali yang dikenal kuat dalam mempertahankan ajaran Hindu, sementara masyarakat lokal khususnya etnis Lampung, Semende, dan Ogan merupakan penganut Islam yang taat. Persepsi mengenai perbedaan identitas ini masih dirasakan hingga kini oleh sebagian besar warga Bali yang bermukim di wilayah Bali Sadhar. Kekuatiran ini tidak saja diungkapkan oleh komunitas lokal dalam bentuk penilaian bahwa orang Bali Sadhar menyembah “berhala” dan mengkonsumsi babi, tetapi juga melahirkan perasangka yang mengakibatkan komunitas Bali Sadhar ini cenderung terkucil dalam interaksi sosialnya. Kasus ini sebenarnya tidak dialami oleh komunitas Bali Sadhar, tetapi juga dialami banyak komunitas migran yang berbeda budaya yang ada di Lampung. (Zainal Arifin, 2020).

Provinsi Lampung memiliki dinamika kehidupan sosial yang ditandai oleh tingkat kemajemukan yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kemajemukan ini terbentuk melalui keberagaman etnis yang menetap dan hidup berdampingan di wilayah tersebut. Selain masyarakat asli etnis Lampung, terdapat pula kelompok pendatang yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti Bali, Jawa, Madura, Tionghoa, serta migran lokal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, bahkan dari daerah-daerah lainnya. Keberagaman budaya, identitas etnis, pola adat, kondisi geografis, serta ekspresi sosial masyarakat yang heterogen ini,

dalam beberapa kasus, berpotensi memicu gesekan antar kelompok etnis. Secara umum, Provinsi Lampung merepresentasikan wilayah yang pluralistik dalam aspek agama, karakter sosial, bahasa, dan berbagai kategori identitas lainnya. Keragaman agama, identitas etnik, dan budaya tanpa disadari telah menciptakan unsur yang mengganggu hubungan keharmonisan dan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Sebagian besar konflik antar golongan yang telah terjadi diakibatkan oleh kultur subyektif yang berbeda-beda. Situasi sosial yang kompleks dan majemuk memiliki potensi untuk memicu konflik antar kelompok. Provinsi Lampung merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama, budaya, etnis, adat istiadat, pandangan hidup, preferensi, dan bahasa yang beragam. Perbedaan-perbedaan tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memunculkan ketegangan sosial yang merusak hubungan antarkelompok serta mengganggu ikatan saling ketergantungan dalam masyarakat. Fenomena ini juga tercermin dalam kondisi sosial di Desa Sidoharjo, di mana data menunjukkan adanya keberagaman dusun yang merepresentasikan latar belakang komunitas yang berbeda-beda, tempat peribadatan yang beragam dari masjid, pura dan gereja. Etnik yang beragam selain Bali pun peneliti temukan dari Jawa, Sunda, Madura, Tionghoa, dan Etnis Lampung sendiri. (Maulidya, 2024)

Masalah keberagaman bukan hanya menjadi permasalahan ekonomi, namun juga berkaitan dengan kehidupan sosial budaya serta kepentingan negara dalam membangun kerangka wacana persatuan pada masyarakat multikultural. Dengan kondisi masyarakat yang beragam tersebut, provinsi Lampung menyimpan pekerjaan rumah untuk membangun kesadaran moderasi beragama guna menciptakan kerukunan antar masyarakat dan umat beragama. Kehidupan dengan corak moderasi beragama dalam rangka menciptakan kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa yang rukun, damai, dan toleran tergambar dalam kehidupan masyarakat multikultural. (Aanbudianto, 2024)

Salah satu ciri khas komunitas Bali Nusa di Balinuraga yang juga mencerminkan identitas umum transmigran Bali adalah kuatnya keterikatan

sosial terhadap tanah kelahiran atau leluhur mereka. Ikatan tersebut menjadi penanda identitas utama yang memungkinkan mereka tetap mempertahankan jati diri sebagai umat Hindu Bali, meskipun telah menetap di luar Pulau Bali. Sistem sosial yang mereka bawa diadaptasi sedemikian rupa agar tetap mencerminkan struktur kehidupan masyarakat asal, khususnya dari Nusa Penida, Bali. Bagi komunitas ini, menjadi "orang Bali" di Lampung bukan sekadar soal asal geografis, melainkan terkait erat dengan kemampuan menjaga dan menjalankan sistem sosial yang mengandung nilai-nilai budaya dan keagamaan Hindu Bali, dengan tetap melakukan penyesuaian terhadap konteks lingkungan sosial yang baru (Bagaskara, 2021).

Aspek demografis dapat diamati melalui pola permukiman yang ditempati oleh transmigran Bali, yang turut mendukung upaya pelestarian dan pemertahanan penggunaan Bahasa Bali di wilayah Lampung. Secara umum, terdapat dua pola permukiman transmigrasi yang diterapkan. Pertama, pola *integrated pluralism* (keragaman terpadu), yakni pola permukiman di mana transmigran dari berbagai latar belakang daerah ditempatkan dalam satu kawasan tanpa pemisahan geografis berdasarkan asal-usul etnis atau kedaerahan. Kedua, pola *segregated pluralism* (keragaman terpisah), yaitu pola permukiman di mana kelompok transmigran yang berasal dari daerah atau etnis yang sama ditempatkan secara terpusat dalam satu wilayah tertentu. Kedua pola ini memberikan implikasi yang berbeda terhadap dinamika sosial dan keberlangsungan identitas budaya, termasuk bahasa. Jika memperhatikan kondisi demografis dan geografis daerah transmigrasi di Lampung, akan sulitlah membedakannya dengan situasi di Bali. Di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur, faktor lingkungan mendukung usaha pemertahanan Bahasa Bali karena pola permukiman yang cenderung terpisah dengan kelompok penutur Bahasa non-Bali. Oleh sebab itu, seorang penutur Bahasa Bali yang datang ke Lampung Tengah akan merasa seperti berada di kelompok masyarakat Bali di Bali. (Luh & Malini, 2012).

Bahwa penelitian ini untuk menganalisis mengenai Transmigrasi Masyarakat Bali Islam di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 – 2025.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana awal mula datangnya orang Bali Muslim di Lampung, serta dampaknya terhadap masyarakat pribumi (Lampung) terkait pendatang transmigrasi Orang Bali Islam.

Melalui pendekatan *Field research*, penelitian ini akan menggali berbagai sumber primer dan sekunder, dari manuskrip kuno hingga masa kini dan studi lapangan. Analisis akan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi setiap fase transformasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana awal mula proses Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada Tahun 1956 – 2025.

1.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian tidak terlalu luas jangkanya serta memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka berdasarkan identifikasi masalah penulis membatasi sebagai berikut: Bagaimana sejarah awal mula proses Transmigrasi pada Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Tengah Pada Tahun 1956 – 2025?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian merupakan pendekatan untuk menjelaskan atau memahami apa yang telah dinyatakan dalam masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, pertanyaan penelitian yang dapat diajukan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Awal Proses Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Lampung pada tahun 1956-2025?
2. Bagaimana Sejarah Masyarakat Muslim Bali di Lampung?

1.4. Batasan Masalah Penelitian

Pembahasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas masalah dengan jelas, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak. Dalam konteks penelitian ini Batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Batasan Geografis: Penelitian ini dibatasi pada wilayah Islam Lampung dengan fokus utama pada Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Pada tahun 1956-2025.
2. Batasan Kronologis: Penelitian ini akan berfokus pada tahun 1956 hingga sampai pada tahun 2025.
3. Batasan Metodologis: Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* dengan fokus pada analisis sumber-sumber tertulis dan studi lapangan yang relevan dengan topik penelitian.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis, mengkaji, dan mendeskripsikan proses Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Tengah pada tahun 1956-2025.
2. Penelitian ini akan berfokus pada periode tahun 1956 hingga sampai pada pada tahun 2025 di Desa Sakti Buana dalam konteks Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan manfaat penelitian adalah penjabaran tentang dampak yang akan dicapai jika tujuan penelitian tercapai. Dalam menjelaskan kegunaan penelitian harus meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1.6.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Sejarah Peradaban Islam khususnya mengenai Sejarah Transmigrasi Masyarakat Bali Islam Lampung di Desa Sakti Buana.

1.6.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta wawasan mengenai Sejarah awal mula Transmigrasi Masyarakat Bali Islam di Desa Sakti Buana Lampung.

b. Bagi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Penelitian ini akan menambah literature yang bisa digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan mengingat pembahasan mengenai Sejarah dan kehadiran Transmigrasi Masyarakat Bali Islam di Lampung Tengah. ini masih sangat minim.

c. Bagi Fakultas Islam Nusantara dan Prodi Sejarah Peradaban Islam

Penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu baru mengenai Islam Lampung.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkuman isi skripsi yang terbagi dalam bab dan subbab, yang mencerminkan kesatuan secara utuh. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I, yaitu berisi Pendahuluan. Pada bagian ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang mana berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir dari isi pendahuluan adalah sistematika penulisan. Bab

ini merupakan gambaran besar Sejarah awal mula terjadinya proses Transmigrasi Masyarakat Bali Islam di Desa Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1956-2025.

BAB II, yang berisi Kajian Teori, pada bagian ini meliputi kerangka teori, kerangka penelitian, dan tinjauan penelitian, terdahulu yang dianggap relevan.

BAB III, yang berisi Metode Penelitian, pada bagian ini meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV, yang berisi Hasil dan Pembahasan, pada bagian ini menyajikan analisis proses terjadinya Transmigrasi Masyarakat Bali Islam di Desa Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 1956-2025, faktor-faktor pendorongnya, dampaknya terhadap metodologi pengajaran, serta kontribusinya terhadap identitas Muslim Indonesia.

BAB V, yang berisi Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran untuk berbagai pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka, merupakan daftar bahan bacaan atau referensi yang menjadi sumber dan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi dapat berupa buku, artikel jurnal, majalah, surat kabar, laporan-wawancara, sumber yang diakses dari internet, dan sebagainya dengan tetap memenuhi kaidah ilmiah.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

Para ahli telah mengemukakan berbagai definisi mengenai teori dalam konteks penelitian. Penggunaan teori oleh peneliti bervariasi, tergantung pada jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan. Namun demikian, terdapat beberapa tipe teori yang secara umum digunakan dalam berbagai penelitian sosial. Secara konseptual, teori dipahami sebagai himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena secara menyeluruh. Teori berfungsi sebagai kerangka berpikir dalam memahami dan menjelaskan hubungan antar variabel dalam suatu konteks tertentu. (Ence Surahman et al., 2020)

2.1.1. Konsep Transmigrasi

Menurut Pusat Litbang Ketransmigrasian (2013), program transmigrasi di Indonesia telah berjalan lebih dari seratus tahun sejak dimulai pada 1905, dan terus dipertahankan sebagai kebijakan pemerintah. Rentang sejarah yang panjang ini menunjukkan bahwa transmigrasi senantiasa dibutuhkan untuk membangun negara kepulauan seperti Indonesia, yang menghadapi berbagai ketimpangan, baik dalam hal hasil ekonomi, pembangunan antarwilayah, perbedaan desa dan kota, maupun distribusi penduduk (Legiani, 2018).

Pasca kemerdekaan, program kolonisasi yang sebelumnya dijalankan pada masa pemerintahan kolonial diadopsi menjadi program transmigrasi sebagai upaya penyebaran penduduk secara nasional (Prihatin, 2013). Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mencanangkan ambisi besar untuk merelokasi sekitar 31 juta jiwa dalam kurun waktu 35 tahun. Target tersebut kemudian meningkat menjadi 49 juta jiwa pada tahun 1951. Namun, kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang belum stabil pada masa awal

kemerdekaan, ditambah dengan keterbatasan sumber daya aparatur dan pembiayaan, menyebabkan rencana tersebut sulit untuk direalisasikan secara optimal (Prihatin 2013). Pada masa orde lama ini muncul kebijakan Transmigrasi Gaya Baru pada musyawarah nasional gerakan transmigrasi yang diselenggarakan pada bulan Desember 1964, konsepnya memindahkan kelebihan fertilitas total yang diperkirakan mencapai angka 1,5 juta per tahun (Setiawan 2006). Selain itu, berkembang pula gagasan mengenai pelaksanaan transmigrasi swakarsa, yaitu bentuk transmigrasi di mana para pendatang baru ditampung dan dibimbing oleh komunitas transmigran yang telah lebih dahulu menetap. Dalam skema ini, para transmigran diharapkan mampu secara mandiri membuka lahan, membangun tempat tinggal, serta membangun infrastruktur dasar seperti jalan. Dengan demikian, beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih ringan (Legiani, 2018).

Transmigrasi, sebagai salah satu bentuk mobilitas penduduk, merupakan wahana terjadinya interaksi antar budaya dari berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan yang terarah guna mempercepat proses integrasi sosial dan akulturasi budaya. Mengingat permasalahan kependudukan memiliki dimensi yang kompleks dan multidimensional, maka sangat penting untuk menetapkan regulasi atau ketentuan yang jelas sebagai landasan pelaksanaan program tersebut.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang transmigrasi, istilah transmigrasi dan transmigran dijelaskan sebagai berikut:

1. Transmigrasi merujuk pada proses perpindahan penduduk yang dilakukan secara terencana dan berkala, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penempatan di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Transmigran adalah warga negara Indonesia yang secara sukarela berpindah dan menetap di kawasan transmigrasi sesuai dengan program yang telah dirancang oleh pemerintah.

Program transmigrasi dalam pemanfaatan memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan peluang usaha dan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya di wilayah-wilayah yang belum berkembang secara optimal.
2. Dalam jangka panjang, program ini bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai fondasi utama bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Legiani, 2018)

Istilah *transmigrasi* tidak selalu merujuk pada perpindahan penduduk yang sepenuhnya disponsori oleh pemerintah, tetapi juga mencakup migrasi yang dilakukan atas inisiatif pribadi, khususnya dari daerah padat penduduk seperti Jawa, Bali, dan Lombok ke wilayah pemukiman baru di luar pulau-pulau tersebut (Rusli, 2012). Secara umum, terdapat tiga bentuk utama transmigrasi:

1. Transmigrasi Umum, yakni bentuk transmigrasi yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditujukan bagi penduduk yang memiliki keterbatasan akses terhadap peluang kerja dan usaha di daerah asalnya.
2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB), yaitu jenis transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah daerah dengan melibatkan badan usaha sebagai mitra dalam mendukung pengembangan usaha transmigran. Program ini ditujukan bagi individu yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang.
3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), yaitu bentuk transmigrasi yang merupakan inisiatif pribadi dari calon transmigran, yang pelaksanaannya tetap berada dalam koordinasi serta memperoleh arahan, pelayanan, dan dukungan dari pemerintah dan/atau pemerintah

daerah, dan ditujukan bagi penduduk yang telah memiliki kapasitas ekonomi dan kemandirian (Legiani, 2018).

Program transmigrasi yang dikenal saat ini memiliki akar historis yang panjang, berawal dari penggunaan istilah *transmigrasi* yang pertama kali dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam surat kabar *Soeloeh Indonesia* pada tahun 1927. Gagasan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mohammad Hatta dalam Konferensi Ekonomi yang diselenggarakan di Kaliurang pada 3 Februari 1946, di mana ia menekankan pentingnya transmigrasi sebagai strategi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Pulau Jawa. Secara resmi, program transmigrasi dimulai pada 12 Desember 1950, ditandai dengan pemberangkatan 25 Kepala Keluarga (KK) atau 98 orang ke Provinsi Lampung peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi (Kemendes PDTT, 2019).

Namun, jauh sebelum masa kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1905, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah melaksanakan program pemindahan penduduk yang disebut *Kolonisatie* (kolonisasi), dengan memindahkan sebanyak 2.795 orang dari Keresidenan Kedu, Jawa Tengah, ke wilayah Gedong Tataan di Lampung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa program transmigrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama merupakan bentuk pengembangan dari program kolonisasi kolonial yang diadaptasi dan dimodifikasi menjadi kebijakan nasional dengan konsep dan tujuan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia pascakemerdekaan (Daniarta Sukarno, 2023).

Transmigrasi adalah aktivitas mobilitas penduduk atau perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain (Maruwae & Ardiansyah, 2020). Umumnya, transmigrasi dilakukan dari daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi menuju daerah yang lebih jarang penduduknya, sebagai upaya untuk pemerataan penduduk di Indonesia (Setyorini et al., 2018). Contohnya adalah perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau

Kalimantan, yang bertujuan mengurangi kepadatan di Jawa dan menambah jumlah penduduk di Kalimantan. Setelah Indonesia merdeka, populasi di Lampung pun meningkat cukup signifikan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan migrasi yang melanjutkan program kolonial Hindia Belanda, yang sejak dulu telah menjadikan Lampung sebagai tujuan favorit para penduduk Jawa (Dharma, 2016). Pemberian lahan sekitar 2 hektar untuk setiap keluarga, disertai harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program migrasi ke Lampung, baik melalui bantuan pemerintah maupun secara mandiri (swakarsa).

Menurut Oktafiani dan Yogaswara (2020), program transmigrasi mengalami kemajuan yang signifikan selama era Orde Baru. Sejak dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Pelita) dari Pelita I hingga Pelita VI (1969–1999), program ini secara konsisten dilaksanakan dengan memindahkan puluhan ribu hingga ratusan ribu penduduk pada setiap periodenya. Di masa tersebut, pemerintah juga memperkenalkan berbagai bentuk inovasi dalam pelaksanaan transmigrasi. Program yang awalnya bersifat konvensional berkembang menjadi berbagai model, seperti Transmigrasi Bedol Desa, program Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Inti Rakyat (PIR), serta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (Daniarta Sukarno, 2023).

Pada era Reformasi, program transmigrasi mengalami penurunan secara kuantitatif, baik dari segi jumlah lokasi tujuan maupun jumlah transmigran yang diberangkatkan. Penurunan ini dipengaruhi oleh diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan masing-masing. Konsekuensinya, pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya terikat pada arahan kebijakan dari pemerintah pusat sebagaimana yang berlaku pada masa Orde Baru (Daniarta Sukarno, 2023).

Kolonisasi Pertama di Lampung, Sejak diterapkannya politik etis, atau *Ethische Politiek* dalam bahasa Belanda, pada 17 September 1901 ketika Ratu Wilhelmina baru naik tahta, terjadi perubahan besar di wilayah Hindia Belanda. Salah satu kebijakan dalam politik etis adalah program kolonisasi, yang berdampak pada perubahan pola persebaran penduduk di wilayah selatan Pulau Sumatera, yaitu Lampung. Daerah yang dijadikan tujuan pemindahan penduduk umumnya memiliki tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah. Dalam konteks Lampung, masyarakat adat setempat juga dinilai memiliki sikap terbuka terhadap pendatang, sesuatu yang telah lama dipahami oleh pemerintah Belanda.

Sikap terbuka masyarakat adat Lampung ini pernah dimanfaatkan oleh Belanda. Ketika VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Banten, mereka berupaya menguasai serta memonopoli hasil rempah-rempah dari Lampung. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah Lampung dipandang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan (Hadikusuma, 1989). Salah satu faktor utama yang mendasari pemilihan Lampung sebagai lokasi kolonisasi adalah tingkat kesuburan tanahnya yang tinggi. Kondisi ini menjadikan Lampung sebagai salah satu pusat produksi tanaman lada, baik pada masa VOC maupun pada periode pemerintahan kolonial Belanda. Sekitar abad ke-19 hingga awal abad ke-20, volume ekspor lada dari Lampung menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Bahkan, pada dekade 1930-an, ekspor lada dari wilayah ini dilaporkan menyumbang hingga 60% dari total ekspor lada dunia (Ahmad Kusworo, 2004: 17).

Walaupun Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat luas, pada dasarnya budaya-budaya tersebut juga menunjukkan sejumlah persamaan, terutama karena budaya dalam satu kawasan regional masih saling berhubungan dengan wilayah di sekitarnya. Bahkan budaya dari pulau yang berbeda pun dapat memiliki kesamaan tertentu, salah satunya akibat adanya program transmigrasi. Misalnya, Pulau Bali dan Jawa

memiliki kemiripan budaya dengan Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung. Dahulu, Lampung menjadi salah satu tujuan transmigrasi, dan kini telah berkembang menjadi miniatur Indonesia. Jika diperhatikan lebih jauh, di Lampung terdapat beragam budaya yang menonjol, tidak hanya budaya asli masyarakat Lampung, tetapi juga budaya para pendatang yang turut dibawa dari daerah asalnya. Di tempat tinggal mereka yang baru ini, kebudayaan leluhur sering kali tetap dipertahankan dan dilestarikan, sehingga membentuk kearifan lokal yang hidup sampai sekarang.

Pembangunan nasional di Indonesia dimaknai sebagai pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh serta pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dengan Pancasila sebagai landasan, tujuan, dan arah pijakannya. Amanat tersebut menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya sekadar proses ekonomi, tetapi juga mencerminkan proses perubahan di bidang politik, sosial, dan budaya yang mencakup seluruh bangsa dalam satu kesatuan utuh. Pembangunan nasional adalah wujud tekad untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, sekaligus mengembangkan kehidupan bermasyarakat serta penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berlandaskan Pancasila. Berbagai pembangunan di semua bidang selama ini menumbuhkan keyakinan di tengah masyarakat Indonesia bahwa langkah-langkah pembangunan telah dijalankan. sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, telah menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan tersebut menjadi dasar untuk dilanjutkan dan ditingkatkan pada era pembangunan yang baru (Legiani, 2018).

Menurut Siagian (2003), pembangunan merupakan suatu proses yang terdiri atas upaya pertumbuhan dan perubahan yang dirancang serta dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka mencapai modernitas sebagai bagian dari pembentukan dan penguatan bangsa (*nation building*). Pada dasarnya, di negara-negara berkembang yang tengah bergerak dari kondisi sosial-ekonomi yang rendah

menuju tingkat yang lebih maju, proses modernisasi membawa perubahan positif terhadap berbagai variabel pembangunan.

Menurut Pusat Litbang Transmigran (2013), keberadaan transmigran bertujuan untuk menciptakan wilayah-wilayah baru berbasis komoditas sebagai pusat pertumbuhan kawasan baru, sekaligus mempercepat pembangunan daerah. Program transmigrasi turut mendorong mobilitas serta persebaran penduduk di berbagai wilayah, dengan tetap memperhatikan dan memprioritaskan kualitas sumber daya manusia guna mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Litbang Transmigran tahun 2013, pembangunan transmigrasi hingga kini telah menghasilkan 3.052 desa, 382 kecamatan, 104 kabupaten/kota, bahkan satu ibu kota provinsi. Sampai saat ini, sekitar 2 juta keluarga atau sekitar 10 juta jiwa telah difasilitasi untuk menetap, bekerja, maupun berusaha di kawasan transmigrasi, sementara generasi penerusnya diperkirakan berjumlah sekitar 20 juta jiwa. Selain itu, telah dibangun jalan sepanjang 50.025 km serta jembatan sepanjang 40.551 km. Program transmigrasi juga mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk sarana pendidikan dan kesehatan. Lebih jauh, program ini memperkuat nilai-nilai persatuan di kawasan transmigrasi dengan mempertemukan beragam latar belakang budaya, suku, dan etnis dalam semangat kebinekaan.

Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan sebagai instrumen strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Tujuan utama dari pengembangan IDM adalah untuk menurunkan jumlah desa tertinggal hingga 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya sebanyak 2.000 desa pada tahun 2019. Guna mencapai target tersebut, diperlukan penetapan lokus desa serta klasifikasi status perkembangannya secara terukur dan terstruktur. IDM tidak hanya berperan sebagai alat pemetaan tingkat kemajuan desa berdasarkan karakteristik

masing-masing, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menentukan sasaran program prioritas dalam rangka pencapaian target RPJMN, sekaligus sebagai sarana koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam pelaksanaan pembangunan desa. IDM menitikberatkan pada penguatan otonomi desa. Indeks ini sejalan dengan semangat nasional untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, sebagaimana tercantum secara tegas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Selain itu, hal ini juga mencerminkan komitmen politik untuk membangun Indonesia dari desa, yang diwujudkan melalui pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada masa pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi–Jusuf Kalla (Hanibal Hamidi, 2018).

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, telah merumuskan program strategis yang berlandaskan pada tiga pendekatan utama, yang dikenal sebagai *Pilar Desa Membangun Indonesia*. Ketiga pilar tersebut mencakup: (i) Jaring Komunitas Wiradesa, (ii) Lumbung Ekonomi Desa, dan (iii) Lingkaran Budaya Desa. Kehadiran ketiga pilar ini diharapkan mampu mengarahkan pengembangan program-program prioritas secara lebih terfokus guna mendorong kemajuan serta kemandirian desa, sekaligus menjadi faktor pendorong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Hanibal Hamidi, 2018).

Ketiga pilar tersebut saling berhubungan. Komitmen dalam memanfaatkan pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersama kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mencapai target, sekaligus menghasilkan dampak berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang *Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023*, serta hasil evaluasi perkembangan kawasan transmigrasi yang telah disampaikan kepada Bappeda Provinsi dan instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui surat Nomor 17/PKT.04.04/I/2024, maka penyusunan makalah kebijakan mengenai *Optimalisasi Peran Daerah Tujuan dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi dan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi* menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Penyusunan kebijakan ini penting sebagai respons atas dinamika pembangunan kawasan transmigrasi yang menuntut sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Urgensi penyusunan ini didasarkan pada beberapa hal: (a) pencapaian persentase kawasan transmigrasi berstatus berdaya saing yang menjadi target prioritas nasional maupun kementerian masih sangat rendah, (b) masih minimnya dukungan dari pemerintah daerah tujuan transmigrasi dalam meningkatkan status perkembangan kawasan transmigrasi, (c) regulasi terkait kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan kawasan transmigrasi belum berjalan efektif, dan (d) intervensi lintas sektor di kawasan transmigrasi belum memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan kawasan transmigrasi yang berdaya saing (Priyadi, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pelaksanaannya mengacu pada asas otonomi seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan

publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Selain itu, pemerintahan daerah juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan kekhususan dan keragaman karakteristik daerah dalam kerangka sistem pemerintahan nasional (Moenta & Anugrah, 2017).

Menurut Harson dalam Sarundajang (1999), pemerintahan daerah memiliki peran sebagai berikut: 1) Local Self Government, yakni pemerintahan daerah yang menjalankan berbagai urusan otonomi di wilayahnya, namun tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara secara keseluruhan; 2) Local State Government, yaitu pemerintahan daerah dalam fungsi administratif yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan negara yang tidak dapat sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat.

Program transmigrasi dianggap sebagai bentuk perkembangan yang bersifat statis, di mana keterbatasan lahan di Pulau Jawa diatasi dengan penyediaan lahan di luar Jawa. Hal ini dipahami sebagai upaya menyebarkan penduduk dari kawasan Jawa ke pulau-pulau lain. Dengan demikian, transmigrasi bukanlah solusi menyeluruh, melainkan hanya bentuk pemindahan dan perluasan wilayah dari masalah yang ada. (Boeke, 1985)

Perkembangan Era Transmigrasi di Indonesia, Sama halnya dengan kebijakan lain yang dijalankan oleh sebuah negara, program transmigrasi di Indonesia juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah pada masanya. Program transmigrasi yang kita kenal sekarang telah melalui berbagai tahapan perubahan. Secara umum, perkembangan transmigrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat fase, yaitu:

a. Transmigrasi pada Masa Pra-Kemerdekaan (Kolonial Belanda dan Pendudukan Jepang)

Implementasi kebijakan transmigrasi sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1905 pada masa pemerintahan kolonial Belanda, yang pada waktu itu dikenal dengan istilah *kolonisasi*. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa serta menyediakan tenaga kerja murah di wilayah-wilayah di luar Jawa (Rustiadi & Junaidi, 2011). Program kolonisasi tersebut berlangsung dalam empat tahapan atau fase (Daniarta Sukarno, 2023).

Fase pertama (1905–1911), pemerintah memberikan sejumlah insentif, antara lain: (a) premi sebesar 20 gulden per keluarga, (b) biaya transportasi senilai 50 gulden per keluarga, dan (c) insentif harian sebesar 0,4 gulden selama masa pembukaan lahan (Putri, 2011). Pada fase kedua (1912–1922), nilai premi ditingkatkan menjadi 22,5 gulden per keluarga, sementara biaya transportasi sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah Belanda mendirikan *Lampongsche Volksbank* untuk menyalurkan kredit senilai 200 gulden dengan bunga 9 persen per tahun (Setiawan, 2005). Fase ketiga (1923–1930), pemerintah hanya memberikan bantuan berupa pinjaman sebesar 22–25 gulden per keluarga, yang ditujukan untuk menutupi biaya transportasi serta pembelian peralatan pertanian. Pinjaman ini wajib dilunasi dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun (Setiawan, 2005). Fase keempat (1931–1941) terjadi bersamaan dengan masa depresi ekonomi global tahun 1930 yang juga berdampak pada kondisi keuangan pemerintah Belanda. Karena animo masyarakat untuk ikut program kolonisasi masih tinggi, pola kolonisasi kemudian diubah menjadi sistem bawon. Dalam sistem ini, pembagian hasil dilakukan dengan rasio 1:7 atau 1:5, yang berarti buruh memperoleh satu bagian dari setiap tujuh atau lima bagian milik pemilik lahan.

b. Era Orde Lama (1945–1968)

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, program kolonisasi yang telah berlangsung pada masa pemerintahan kolonial tetap dilanjutkan oleh pemerintah, namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi *transmigrasi*, sebagaimana dikenal hingga saat ini. Presiden Soekarno menetapkan transmigrasi sebagai salah satu program prioritas nasional dan bahkan menyebutnya sebagai "soal hidup dan matinya bangsa Indonesia". Pada masa ini, tujuan utama transmigrasi adalah pemerataan penduduk di seluruh wilayah nusantara (Prihatin, 2013). Arah kebijakan pelaksanaan transmigrasi tercantum secara eksplisit dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menekankan pentingnya penyebaran penduduk dan tenaga kerja, serta pembukaan dan pengembangan kawasan produksi dan pertanian sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah (Dahlan, 2014). Pada awal pelaksanaannya, program ini berada di bawah koordinasi Jawatan Transmigrasi yang bernaung di Kementerian Sosial, dan pada tahun 1960 dilebur bersama urusan perkoperasian menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

Pada periode 1950–1959, pemerintah Indonesia berhasil memindahkan sekitar 227.360 jiwa dari Pulau Jawa (Setiawan, 2005). Ragam pola transmigrasi di masa Orde Lama cukup bervariasi, di antaranya Transmigrasi Umum, Transmigrasi Keluarga, Transmigrasi Mandiri, hingga Transmigrasi Spontan. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini terbilang tinggi, bahkan sebagian warga memilih bertransmigrasi dengan biaya sendiri tanpa bantuan pemerintah. Metode Transmigrasi Swakarya dijalankan dengan konsep di mana kelompok perintis menanggung biaya kelompok berikutnya, serupa dengan sistem *bawon* yang pernah diterapkan oleh Belanda (Firmansyah, 2018).

c. Era Orde Baru (1969–1998)

Pada masa pemerintahan Orde Baru, program transmigrasi ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh (Putra, 2019). Pelaksanaan program ini mengalami perkembangan yang signifikan, dengan cakupan tujuan yang tidak lagi terbatas pada aspek demografis semata, melainkan juga mencakup dimensi nondemografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan Pokok Transmigrasi, program transmigrasi diarahkan untuk mencapai sejumlah sasaran, antara lain: (a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (b) mendorong percepatan pembangunan daerah; (c) menciptakan pemerataan distribusi penduduk; (d) memperluas jangkauan pembangunan ke seluruh wilayah nasional; (e) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga kerja; (f) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; serta (g) mendukung ketahanan dan keamanan nasional.

Pada masa Orde Baru, transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung produksi beras dalam rangka mencapai swasembada pangan. Kawasan transmigrasi juga dikembangkan di berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, bahkan hingga Papua (Setiawan, 2005).

Dengan pergeseran orientasi menuju pembangunan wilayah, pola permukiman transmigrasi dirancang agar dapat menjadi pusat pertumbuhan baru. Kebijakan pelaksanaan transmigrasi awalnya dipegang oleh Departemen Transmigrasi dan Koperasi yang sebelumnya berstatus sebagai Jawatan Transmigrasi pada tahun 1960. Selanjutnya, pada tahun 1978, kewenangan transmigrasi berada di bawah Menteri Muda Urusan Transmigrasi, kemudian tahun 1980 berada di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans).

Pada periode Pelita IV (1984–1989), program transmigrasi mulai diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman transmigrasi, serta memperluas pengembangan sektor usaha di luar komoditas tanaman pangan. Fokus pembangunan diperluas mencakup Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dengan skema Perkebunan Inti Rakyat (PIR), jasa industri, perikanan, dan peternakan. Memasuki masa Pelita V (1989–1994), arah kebijakan transmigrasi secara umum masih melanjutkan strategi yang telah diterapkan pada periode sebelumnya. Sementara itu, pada Pelita VI (1994–1999), program transmigrasi lebih difokuskan untuk mendukung pembangunan wilayah, mempercepat pemerataan distribusi penduduk dan tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan baik bagi transmigran maupun masyarakat lokal. Kebijakan ini juga bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional (Dirjen PKPPT, 2015). Di samping itu, pada masa ini mulai diperkenalkan alternatif kebijakan berupa skema Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM), sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan transmigrasi berbasis kemandirian (Oktafiani & Yogaswara, 2020).

d. Era Reformasi (1999–sekarang)

Pada masa reformasi, program transmigrasi mengalami penurunan tajam akibat situasi ekonomi, sosial, dan politik yang kurang mendukung. Pada periode 2000–2004, rata-rata hanya 87.571 KK per tahun yang berpartisipasi dalam program transmigrasi, kemudian menurun lagi menjadi 41.853 KK per tahun pada 2005–2009, dan turun drastis menjadi 7.310 KK per tahun di 2010–2011 (Junaidi et al., 2012). Perubahan sistem pemerintahan menuju otonomi daerah turut memengaruhi minat pemerintah daerah dalam menyelenggarakan transmigrasi. Selain itu, munculnya isu eksklusivitas pendatang terhadap masyarakat lokal juga menimbulkan penolakan dari penduduk asli.

Pada tahun 2009, dikembangkan pendekatan baru transmigrasi melalui pembentukan Kota Terpadu Mandiri (KTM), berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP.293/MEN/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kawasan Transmigrasi. Konsep KTM adalah pembangunan kawasan transmigrasi yang dirancang secara holistik dan menyeluruh di berbagai bidang, sehingga memerlukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas instansi. KTM diharapkan menjadi pusat pertumbuhan kota baru melalui strategi seperti pendirian pusat produksi pertanian dan agribisnis berbasis pasar (market driven), optimalisasi produksi komoditas unggulan, pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, serta deregulasi guna mendorong usaha dan pertumbuhan ekonomi wilayah (Kalsum & Caesariadi, 2016). Didirikan pusat-pusat produksi pertanian serta sentra agribisnis yang berfokus pada orientasi pasar (market driven), yang diarahkan untuk mengoptimalkan produksi komoditas pertanian unggulan. Selain itu, pembangunan juga mencakup pengembangan infrastruktur dan fasilitas kawasan guna meningkatkan produksi dan kualitas pelayanan masyarakat. Di samping itu, dilakukan deregulasi untuk mendukung pertumbuhan usaha serta pengembangan ekonomi daerah dan wilayah.

Transmigrasi di Kawasan Perbatasan Negara, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.900 km, dengan sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung, baik darat maupun laut, dengan sepuluh negara lain. Banyak wilayah perbatasan ini belum terjangkau dinamika pembangunan. Sebagian besar kawasan perbatasan masih tergolong wilayah tertinggal karena minimnya infrastruktur sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat (Rohani Budi Prihatin, 2012). Untuk menjaga wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu mengembangkan program transmigrasi di titik-titik strategis tersebut. Pengembangan kawasan

transmigrasi ini berperan sebagai sabuk pengaman (security belt) Nusantara guna menegaskan kedaulatan bangsa dan negara, agar tidak mudah diincar atau diklaim oleh negara lain.

Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terdepan, perlu mendapat perhatian bersama mengingat posisinya yang strategis dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, serta untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan adil. Pelaksanaan program transmigrasi di kawasan perbatasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja, sekaligus memperkuat ketahanan dan pertahanan nasional. Pemerintah seharusnya berkomitmen untuk memperbesar kontribusi pembangunan transmigrasi dalam pengembangan wilayah perbatasan, melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat setempat. Pendekatan berbasis kesejahteraan di kawasan perbatasan ini juga dinilai dapat secara efektif mendukung strategi keamanan teritorial yang sudah berjalan.

2.1.2. Konsep Islam Nusantara

Jurnal *ISLAM NUSANTARA: Journal for Study of History and Culture* hadir sebagai media ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan kajian akademik dan pengetahuan tentang Islam Nusantara. Sejak istilah *Islam Nusantara* diangkat sebagai tema utama dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 pada tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur, konsep ini telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Meski demikian, sebagian pihak masih memperdebatkannya dalam konteks artifisial maupun politis, sehingga hingga kini belum muncul landasan historis dan epistemologis yang kuat dan memadai (Ahmad Suaedy, 2020)

Secara historis, istilah *Nusantara* pada awalnya merujuk pada wilayah atau pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa. Seiring waktu,

makna tersebut mengalami penyempitan dan berkembang menjadi pengertian yang lebih spesifik, yakni sebagai sebutan untuk wilayah kepulauan secara keseluruhan, yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *archipelago*. Kata ini, sejauh bisa ditemukan, setidaknya sudah dipakai sejak awal abad XIV M ketika Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang paling kesohor, pada era itu diperkenalkan Sumpah Palapa dalam nuansa alam maritim untuk menyatukan berbagai masyarakat yang bersuku-suku dan kerajaan yang tersebar di berbagai pulau tersebut. Sejak masa itu, kata Nusantara selalu dipakai dalam pengertian menyatukan wilayah kepulauan dan laut, dengan demikian, diartikan sebagai menyatukan bukan memisahkan pulau-pulau di wilayah tersebut. Wilayah Nusantara, yang kini dikenal sebagai Indonesia, pada masa lampau pernah disatukan tidak hanya oleh kekuasaan Kerajaan Majapahit, tetapi juga oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera. Kekuasaan Sriwijaya bahkan meluas ke wilayah utara, melampaui batas-batas geografis Indonesia saat ini dan mencakup sebagian kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, konsep Nusantara lebih tepat dipahami sebagai suatu entitas wilayah yang bersifat multipusat, bukan sebagai kawasan yang terpusat atau tersentralisasi pada satu kekuatan dominan. (Ahmad Suaedy, 2020)

Dalam kajian keislaman, Islam Nusantara tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu bersifat normatif, dan juga bukan sekadar penelitian bergaya orientalis yaitu penelitian yang mengambil jarak dari persoalan, mengategorikan, lalu menggambarkan karakteristik objek kajian semata. Penelitian mengenai Islam Nusantara justru berupaya menonjolkan tujuan etis, yakni mendorong perubahan atau transformasi dengan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, serta mencari solusi yang adil dan seimbang demi terciptanya perdamaian di tengah umat manusia. Selain itu, Islam Nusantara berusaha membangun sikap kritis baik terhadap ilmu-ilmu sosial yang sekular-positivistik maupun terhadap studi keislaman yang normatif dan orientalis, dengan menghadirkan orientasi etis dalam ilmu itu sendiri.

Prinsip kesetaraan manusia, multikulturalisme, keberpihakan pada kelompok rentan, dan sikap kritis terhadap otoritarianisme menjadi landasan dalam penelitian Islam Nusantara, termasuk dalam kerangka *dirasah islamiah*.

Kerangka tersebut sejalan dengan gagasan Ernst dan Martin dalam “Rethinking Islamic Studies, From Orientalism to Cosmopolitanism (Carl W. Ernst bersama Richard C. Martin, 2010).” Namun, dalam konteks Islam Nusantara, konsep kosmopolitan dalam studi Islam tidak hanya terbatas pada kajian eksklusif mengenai Islam sebagaimana dilakukan oleh orientalis atau kajian Islam tradisional, termasuk di kalangan akademisi Muslim sendiri. Pendekatan Islam Nusantara mencakup berbagai dimensi sosial, politik, sejarah, dan nilai-nilai lokal dengan memadukan metode ilmu-ilmu sosial dan keilmuan Islam (Richard C. Martin, 2000). Lebih jauh, Islam dalam perspektif ini bukan hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga menjadi sudut pandang serta alat untuk memahami objek kajian lain, sehingga tidak sekadar bersifat artifisial atau campuran semata (Carl W. Ernst bersama Richard C. Martin, 2010). Salah satu cara mengembangkan kerangka ini adalah dengan memanfaatkan landasan filsafat serta kajian sejarah. Filsafat berfungsi untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental sebagai titik awal kajian, sedangkan sejarah menjadi elemen penting dalam penelitian Islam Nusantara meskipun bersifat multidisipliner, karena sejarah menembus batas waktu maupun objek tanpa terikat identitas pelaku atau konteks tertentu, misalnya mengenai Islam atau agama lain. Disiplin lain seperti antropologi dan sosiologi dapat memperkaya penelitian ini. Dengan demikian, perspektif, metode, dan pendekatannya tetap berada dalam kerangka studi Islam dengan berbagai kombinasinya, tetapi cakupan dan objek kajiannya bersifat lintas waktu, lintas topik, dan juga dapat menyentuh agama atau kepercayaan lain, tidak terbatas pada kajian Islam yang normatif dan eksklusif.

Teori tentang masuknya Islam ke wilayah Nusantara menyatakan bahwa sejak awal abad Masehi telah terdapat jalur-jalur pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan berbagai pulau dan daerah. Kawasan timur, termasuk kepulauan di wilayah India Timur serta pesisir selatan Tiongkok, diketahui telah menjalin interaksi dagang dengan dunia Arab. Melalui aktivitas perdagangan inilah, kontak awal antara masyarakat lokal dan pedagang Muslim diperkirakan menjadi jalur awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Pedagang Arab datang ke Nusantara melalui jalur laut dengan rute dari Aden menyisir pantai menuju Maskat, Raisut, Siraf, Guandar, Daibul, Pantai Malabar yang meliputi Gujarat, Keras, Quilon, dan Kalicut kemudian menyisir pantai Karamandel seperti Saptagram ke Chitagong (pelabuhan terbesar di Bangladesh), Akyab (sekarang wilayah Myanmar), Selat Malaka, Peureulak (Aceh Timur), Lamno (pantai barat Aceh), Barus, Padang, Banten Cirebon, Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Makasar, Ternate, dan Tidore. (Syafrizal, 2015)

Perbedaan dalam sudut pandang serta variasi bukti-bukti historis yang ditemukan telah melahirkan berbagai teori mengenai proses masuknya Islam ke wilayah Indonesia. Berdasarkan asal-usul geografis penyebarannya, setidaknya terdapat lima teori utama yang menjelaskan bagaimana Islam pertama kali hadir di Nusantara, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian berikut.

Teori pertama adalah Teori Arab, sebagaimana dijelaskan oleh Hasbullah (2015). Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk dan menyebar ke wilayah Nusantara secara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi, yakni pada masa ketika Kerajaan Sriwijaya tengah mengembangkan pengaruhnya. Para pendukung teori ini antara lain Crawford, Keijzer, Niemann, de Hollander, A. Hasjmy, Hamka, Syed Muhammad Naquib al-Attas, H. Agus Salim Djajadiningrat, dan Mukti Ali. Teori ini dianggap memiliki dasar historis yang kuat. Pada abad ke-7 dan ke-8, Selat Malaka telah menjadi jalur penting yang ramai dilalui oleh para

pedagang Muslim dalam aktivitas perdagangan mereka ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Berita dari Dinasti Tang di Tiongkok mencatat bahwa pada masa tersebut telah terdapat komunitas Muslim di Kunlun (Kanton), yang datang bersama misi dagang dari kekhalifahan Umayyah. Hamka juga menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar tahun 674 Masehi. Catatan dari sumber Tiongkok menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, seorang utusan dari Arab bernama *Ta Cheh* atau *Ta Shih*—yang kemungkinan besar merujuk pada Muawiyah bin Abu Sufyan—mengunjungi Kerajaan Ho-Ling (Kalingga) yang saat itu diperintah oleh Ratu Shima. Nama *Ta-Shih* juga tercantum dalam sumber Jepang pada tahun 748 M, yang menyebutkan keberadaan kapal-kapal dagang dari Po-sse dan *Ta-Shih Kuo*. Menurut Rose di Meglio, istilah Po-sse menunjukan jenis Bahasa Melayu sedangkan Ta-Shih hanya menunjukan orang-orang Arab dan Persia bukan Muslim India. Juneid Parinduri kemudian memperkuat lagi, pada 670 M, di Barus Tapanuli ditemukan sebuah makam bertuliskan Hamim. Semua fakta tersebut tidaklah mengherankan mengingat bahwa pada abad ke-7, Asia Tenggara memang merupakan lalu lintas perdagangan dan interaksi politik antara tiga kekuasaan besar, yaitu Cina di bawah Dinasti Tang (618-907), Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7-14), dan Dinasti Umayyah (660-749). (Syafrizal, 2015)

Teori kedua adalah Teori Cina, yang menyatakan bahwa komunitas Muslim keturunan Tionghoa memiliki peran signifikan dalam proses penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Sebagaimana telah diuraikan dalam Teori Arab, hubungan antara dunia Islam—khususnya Arab—dan Tiongkok telah terjalin sejak abad pertama Hijriah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam ke Nusantara dan ke Tiongkok terjadi secara bersamaan melalui jalur perdagangan maritim yang sama dari arah barat. Islam tercatat masuk ke wilayah Tiongkok melalui pelabuhan Kanton (Guangzhou) pada masa pemerintahan Kaisar Tai Tsung (627–650 M) dari Dinasti Tang. Sementara itu, kedatangan Islam ke wilayah Nusantara,

khususnya Sumatra, berlangsung pada masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Bukti historis lainnya menunjukkan bahwa pada tahun 674 M, seorang utusan dari kerajaan Arab bernama *Ta Cheh* atau *Ta Shih* mengunjungi Kerajaan Kalingga di Pulau Jawa, yang saat itu diperintah oleh Ratu Shima. (Syafriзал, 2015)

Teori ketiga adalah Teori Persia, yang berbeda dari dua teori sebelumnya karena lebih menitikberatkan pada aspek linguistik sebagai bukti awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam di wilayah ini memiliki keterkaitan kuat dengan budaya dan bahasa Persia, yang jejaknya dapat ditemukan dalam kosakata lokal. Salah satu contohnya adalah penggunaan kata *abdas* oleh masyarakat Sunda untuk merujuk pada praktik wudu, yang merupakan serapan dari bahasa Persia. Fenomena ini menunjukkan adanya proses akulturasi budaya dan bahasa yang mengindikasikan pengaruh Persia dalam proses islamisasi di Nusantara.

Bukti lain yang memperkuat pengaruh Persia dalam proses penyebaran Islam di Nusantara terlihat dari adaptasi bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat lokal. Dalam kaidah bahasa Arab, kata-kata yang berakhiran *ta' marbūtah* saat diwakafkan umumnya dilafalkan dengan akhiran "h", seperti *shalātun* yang dibaca *shalāh*. Namun, dalam perkembangan bahasa di Nusantara, pelafalan tersebut mengalami penyesuaian fonetik menjadi bentuk seperti *salat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya. Pola perubahan ini menunjukkan proses integrasi bahasa Arab dengan struktur fonologis lokal yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perantara budaya Persia. (Syafriзал, 2015)

Keempat, Teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut lima tempat asal Islam di India yaitu Gujarat, Cambay, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori India yang menjelaskan

Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan-kelemahan. Hal ini dibuktikan oleh G.E. Marrison dengan argumennya “Meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal, seperti yang dikatakan Fatimi. Itu tidak lantas berarti Islam juga didatangkan dari sana” Marrison mematahkan teori ini dengan menunjuk pada kenyataan bahwa ketika masa Islamisasi Samudera Pasai, yang raja pertamanya wafat pada 698 H/1297 M, Gujarat masih merupakan Kerajaan Hindu. Barulah setahun kemudian Gujarat ditaklukan oleh kekuasaan muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, pastilah telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian Malikush Shaleh. Dari teori yang dikemukakan oleh G.E. Marrison bahwa Islam Nusantara bukan berasal dari Gujarat melainkan dibawa para penyebar muslim dari pantai Koromandel pada akhir abad XIII. (Syafrizal, 2015)

Teori yang dikemukakan Marrison kelihatan mendukung pendapat yang dipegang T.W. Arnold. Menulis jauh sebelum Marrison, Arnold berpendapat bahwa Islam dibawa ke Nusantara, antara lain dari Koromandel dan Malabar. Ia menyokong teori ini dengan menunjuk pada persamaan mazhab fiqh di antara kedua wilayah tersebut. Mayoritas muslim di Nusantara adalah pengikut Mazhab Syafi’i, yang juga cukup dominan di wilayah Kolomandel dan Malabar, seperti disaksikan oleh Ibnu Batutah (1304-1377), pengembara dari Maroko, ketika ia mengunjungi Kawasan ini. Menurut Arnold, para pedagang dari Koromandel dan Malabar mempunyai peranan penting dalam perdagangan antara India dan Nusantara. Sejumlah besar pedagang ini mendatangi pelabuhan-pelabuhan dagang dunia Nusantara-Melayu, mereka ternyata tidak hanya terlibat dalam perdagangan, tetapi juga dalam penyebaran Islam. (Syafrizal, 2015)

Kelima, teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin Van Bruinessen yang dikutip dalam Moeftlich Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari

Turki. Ia mencatat sejumlah data. *Pertama*, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia dan kitab-kitab karangan ulama Kurdi menjadi sumber-sumber yang berpengaruh luas. Misalkan, Kitab *Tanwir al-Qulub* karangan Muhammad Amin al-Kurdi populer dikalangan tarekat Naqshabandi di Indonesia. *Kedua*, di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia Tarekat Syattariyah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim al-Kurani. Ibrahim al-Kurani yang kebanyakan muridnya orang Indonesia adalah ulama Kurdi. *Ketiga*, tradisi berzanji populer di Indonesia dibacakan setiap Maulid Nabi 12 Rabi'ul Awal, saat akikah, syukuran, dan tradisi-tradisi lainnya. Menurut Bruinessen, berzanji merupakan nama keluarga berpengaruh dan syeikh tarekat di Kurdistan. *Keempat*, Kurdi merupakan istilah nama yang populer di Indonesia seperti Haji Kurdi, jalan Kurdi, gang Kurdi, dan seterusnya.

Teori-teori seperti Persia, India, Cina, dan Turki lebih menekankan pada pengaruh-pengaruh budaya dan keagamaan yang muncul setelah keberadaan komunitas Muslim yang cukup signifikan di Nusantara. Oleh karena itu, keberadaan teori-teori tersebut tidak dapat dianggap sebagai sanggahan terhadap teori kedatangan awal Islam, melainkan justru memperkaya dan melengkapi pemahaman mengenai proses Islamisasi di wilayah ini secara bertahap dan berkelanjutan (Syafriзал, 2015)

Strategi Penyebaran Islam di Nusantara, Dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Nusantara, terdapat sejumlah strategi yang diterapkan sehingga agama Islam relatif lebih mudah diterima dibandingkan ajaran agama lain. Strategi-strategi tersebut beragam dan tidak mengandung unsur pemaksaan (Syafriзал, 2015).

Salah satu strateginya adalah melalui jalur perdagangan. Awalnya, komunitas muslim di wilayah ini hanya merupakan kelompok kecil yang kurang berpengaruh. Namun, berkat interaksi para pedagang muslim dari kawasan Arab, Persia, anak benua India, Melayu, hingga Cina yang terjadi

secara berkelanjutan, komunitas muslim kian memperoleh posisi terhormat, sehingga terbentuklah masyarakat muslim yang lebih besar. Selain melakukan aktivitas dagang, para penyebar agama Islam dari berbagai wilayah tersebut turut mengenalkan ajaran Islam melalui jalur pelayaran.

Strategi kedua, adalah melalui jalur dakwah bi al-hāl yang dilaksanakan oleh para mubalig yang juga berprofesi sebagai pedagang. Awalnya dakwah dijalankan secara perorangan. Mereka menjalankan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan menonjolkan kebersihan serta menunjukkan sikap hidup sederhana dalam interaksi sosial.

Strategi ketiga, melalui jalur perkawinan, yaitu pernikahan antara para pedagang Muslim atau mubalig dengan putra-putri bangsawan Nusantara. Berawal dari pengetahuan luas serta kemampuan dalam bidang pengobatan yang bersumber dari tuntunan hadits Nabi Muhammad Saw., sejumlah kaum muslim memberanikan diri mengikuti sayembara yang diadakan oleh raja, yang menetapkan bahwa siapa pun yang berhasil menyembuhkan putrinya akan dijadikan saudara apabila berjenis kelamin perempuan, atau menantu jika laki-laki. Melalui perkawinan dengan putri raja inilah posisi Islam semakin menguat dan dihormati.

Strategi keempat, melalui jalur pendidikan. Setelah para pedagang memperoleh posisi yang mapan, mereka menguasai kekuatan ekonomi di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Gresik. Wilayah-wilayah pusat perdagangan ini berkembang menjadi pusat kegiatan pendidikan sekaligus penyebaran agama Islam. Lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah di kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi para pelajar serta turut mengirimkan mubalig lokal, di antaranya adalah Maulana Malik Ibrahim yang kemudian berdakwah ke Jawa.

Strategi kelima, melalui jalur kebudayaan. Awalnya proses islamisasi sempat berhadapan dengan tradisi Jawa yang kuat dipengaruhi unsur

Hindu-Buddha. Namun setelah runtuhnya Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, penyebaran Islam di Jawa menyesuaikan diri dengan budaya lokal, sementara di Sumatera adat istiadat disesuaikan dengan ajaran Islam. Islam terus berkembang dari masa ke masa berkat peran para mubalig. Meski demikian, masih ada perbedaan-perbedaan dalam praktik ibadah yang dipengaruhi faktor budaya. Oleh karena itu, para penerus bangsa Indonesia diharapkan dapat berupaya menyatukan pemahaman tentang ajaran Islam secara lebih baik.

Tokoh Penting dalam Penyebaran Islam di Nusantara, dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh sentral. Kehadiran tokoh-tokoh ini memberikan dorongan semangat sehingga ajaran Islam berhasil menyebar hingga ke pelosok Nusantara. Selain itu, tokoh-tokoh tersebut umumnya berkaitan erat dengan kekuasaan kerajaan, mengingat struktur Nusantara pada masa itu terdiri dari kerajaan-kerajaan. Tidak kalah penting, kontribusi para ulama juga memiliki peranan besar dalam proses islamisasi di wilayah Nusantara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara dijalankan melalui peran para ulama dan juga para penguasa kerajaan. Berikut beberapa contoh kerajaan Islam beserta para ulama yang berkontribusi dalam penyebaran Islam di Nusantara (Syafrizal, n.d.):

Penyebaran Islam di wilayah Sumatera telah berlangsung secara luas sejak masa awal abad ke-16 Masehi. Berdasarkan catatan Tome Pires yang dikutip dalam *Ensiklopedi Indonesia* melalui karya *Arus Sejarah*, disebutkan bahwa sepanjang pesisir Selat Malaka hingga pantai barat Sumatera telah berdiri sejumlah kerajaan Islam, baik berskala besar maupun kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain mencakup Aceh, Biar, Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupert, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, Andalas, Pariaman, Minangkabau, Tikur, Panchur, hingga Barus. Beberapa dari kerajaan ini mengalami perkembangan yang pesat dan mencapai kemajuan, sementara sebagian lainnya mengalami

kemunduran atau keruntuhan. Salah satu kerajaan Islam tertua yang tercatat telah berdiri bahkan dua abad sebelum kedatangan Tome Pires adalah Kesultanan Samudera Pasai.

Kerajaan Samudera Pasai terletak sekitar 15 kilometer di sebelah timur Kota Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan diperkirakan mulai mengalami perkembangan signifikan pada kisaran tahun 1270 hingga 1275 Masehi, atau pada pertengahan abad ke-13. Sultan pertama yang memerintah kerajaan ini adalah Malik al-Shālih, yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam sumber-sumber tradisional seperti *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Raja-Raja Pasai*, sosok Malik al-Shālih juga dikenal dengan nama Merah Selu.

Letak strategis Kerajaan Samudera Pasai yang berada di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional menjadi faktor penting yang mendorong pesatnya pertumbuhan kerajaan tersebut. Perkembangan jaringan perdagangan maritim turut dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan regional pada masa itu, seperti ekspansi kekhalifahan Umayyah di Asia Barat, dominasi Dinasti Tang di Asia Timur, serta pengaruh kuat Kerajaan Sriwijaya di kawasan Asia Tenggara. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan Samudera Pasai sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di kawasan Nusantara.

Di masa pemerintahan Sultan Malikush Shaleh, Kesultanan Samudera Pasai diduga telah menjalin hubungan dengan Tiongkok. Hal ini tercatat dalam sejarah Dinasti Yuan, yang menyebutkan bahwa pada tahun 1282 seorang utusan Tiongkok bertemu dengan salah satu pejabat kerajaan Sumutra (Samudera) di Quilon, dan meminta agar raja Sumutra mengirimkan perwakilannya ke Tiongkok. Pada tahun yang sama, tercatat dua orang utusan dari Samudera bernama Sulaiman dan Syamsudin.

Kesultanan Samudera Pasai telah menggunakan mata uang seperti Ceitis dan dramas, serta menjalankan aktivitas ekspor antara lain lada, sutra, kapur barus, dan berbagai komoditas lainnya. Barang-barang tersebut diperoleh karena wilayah ini berfungsi sebagai pusat pengumpulan hasil perdagangan dari berbagai daerah. Dalam aspek keagamaan, Ibnu Batutah melaporkan keberadaan para ulama dari Persia, Suriah, dan Ishafan. Ia juga menggambarkan ketaatan Sultan Samudera Pasai terhadap ajaran Islam bermazhab Syafi'i, serta kebiasaannya dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Dengan demikian, Kesultanan Samudera Pasai memainkan peranan yang signifikan dalam proses penyebaran Islam (Uka Tjandrasasmita, 2012).

Masuknya dan berkembangnya Islam di kawasan pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan melalui temuan arkeologi serta sumber-sumber seperti babad, hikayat, legenda, dan catatan asing. Proses islamisasi di sejumlah kota pesisir utara Jawa, mulai dari bagian timur hingga ke barat, secara bertahap memunculkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Pajang, dan Mataram. Selain peran kerajaan, kontribusi para ulama di Jawa juga sangat besar dalam proses penyebaran Islam. Para ulama ini tidak hanya berperan sebagai penerus misi kenabian, tetapi juga sebagai jembatan antara budaya lokal dengan ajaran Islam.

2.1.3. Konsep Bali Islam Lampung

Masuknya Islam ke wilayah Lampung pada periode 1552–1570 didahului oleh pengaruh kebudayaan Hindu yang telah lebih dahulu membentuk sistem pemerintahan dan struktur sosial masyarakat setempat. Dalam konteks ini, proses islamisasi di Lampung tidak serta-merta diterima secara menyeluruh oleh masyarakat lokal. Bahkan, masyarakat Lampung yang kemudian memeluk Islam tetap menunjukkan jejak-jejak pengaruh Hindu dalam praktik keagamaannya. Penyebaran Islam di Lampung menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat masih

adanya perbedaan pendapat serta keterbatasan data mengenai jalur penyebaran dan metode dakwah yang digunakan.

Pada masa pengaruh Hindu, Lampung telah menjalin hubungan dengan dunia luar. Salah satu buktinya adalah ditemukannya peninggalan berupa keramik dari Dinasti Han di wilayah ini. Selain itu, dalam *Sejarah Dinasti T'ang* disebutkan bahwa utusan dari wilayah Ho-Lo-Yeu mengunjungi Tiongkok bersama rombongan dari Tolang Phohwang. Nama *Tolang Phohwang*, yang merupakan gabungan dua kata, diyakini merujuk pada *Tulang Bawang*, yakni sebuah nama sungai yang kini mengalir di Kabupaten Lampung Utara dan melintasi Kota Menggala. Temuan ini mengindikasikan bahwa wilayah Lampung telah memiliki interaksi internasional yang cukup aktif sejak masa lampau (Nanik Junaidah, 2008).

Transmigrasi Etnis Bali di Seputih Mataram Tahun 1953–1969. Seputih Mataram merupakan salah satu wilayah di Lampung yang memiliki keragaman unsur budaya dan masyarakat. Penduduknya terdiri dari kelompok pendatang dan masyarakat asli setempat. Para pendatang ini sebagian besar berasal dari etnis Jawa dan Bali, yang datang ke Lampung melalui program transmigrasi. Awalnya jumlah mereka relatif sedikit, namun seiring waktu, populasi etnis pendatang, termasuk etnis Bali, terus berkembang. Di wilayah Seputih Mataram, komunitas Bali hidup secara homogen di desa-desa mereka sendiri. Terdapat tiga desa yang menjadi tempat tinggal mereka, yaitu Tirta Yoga (Pakte), Wirata Agung, dan Dharma Agung. Secara umum, pola kehidupan masyarakat Bali di daerah ini masih menyerupai kehidupan di Pulau Bali, daerah asal mereka.

Bali merupakan wilayah yang didominasi oleh kawasan pegunungan dan perbukitan, dengan rangkaian pegunungan yang membentang dari barat ke timur. Pulau ini juga memiliki wilayah dataran yang cukup luas, terutama di bagian selatan, dengan curah hujan yang memadai. Masyarakat Bali umumnya bekerja di sektor pertanian sawah, selain itu banyak pula yang

berprofesi sebagai pengrajin (Koentjaraningrat, 2004: 292). Sementara itu, Lampung memiliki wilayah yang bervariasi mulai dari perbukitan, pegunungan, daerah berombak hingga bergelombang, serta terdapat dataran aluvial, rawa, daerah pasang surut, dan banyak dialiri sungai. Lampung juga dikenal memiliki potensi kekayaan alam yang tinggi (Sabaruddin, 2012: 35).

Kondisi geografis yang berbeda ini menuntut etnis Bali untuk beradaptasi ketika berpindah ke wilayah baru. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wayan Sumadra, seorang transmigran asal Bali, dijelaskan bahwa:

“Dulu sampai di Lampung masih alas semua. Macan, gajah itu masih banyak dulu. Lain sama di Bali dari dulu udah rame. Jadi di sini (Seputih Mataram) harus buka lahan lagi nebangin pohon besar-besar semua dikerjain gotong royong.” (Sabaruddin, 2012: 35).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mereka menghadapi tantangan berat di lingkungan baru, yang masih berupa alam liar dan belum banyak tersentuh aktivitas manusia. Kondisi ini memerlukan proses panjang untuk beradaptasi, termasuk upaya keras dalam membuka lahan, mengelola lingkungan, hingga akhirnya mampu membangun desa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pelaksanaan kolonisasi pertama di wilayah Keresidenan Lampung dimulai melalui tahap uji coba penempatan penduduk di beberapa lokasi, yakni Bagelen pada tahun 1905, Wonosobo pada 1922, serta Trimurjo dan Sukadana pada tahun 1932. Proses pemindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung dilakukan melalui jalur laut, dengan prosedur yang mencakup pendataan serta pemeriksaan kesehatan calon kolonis sebelum keberangkatan. Setibanya di Lampung, para kolonis asal Jawa diarahkan melalui Pelabuhan Panjang, yang terletak di wilayah pesisir selatan

Lampung dan berdekatan dengan pusat administrasi Karesidenan Lampung (Umam, 2022).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada 8 April 2024 di Desa Rama Dewa, mayoritas penduduk setempat dapat dikategorikan sebagai masyarakat Bali, meskipun terdapat beberapa kepala keluarga yang berasal dari etnis lain seperti Jawa, Lampung, Sunda, dan sebagainya. Lingkungan di Desa Rama Dewa terbilang menarik, dengan penduduk yang ramah serta menjalin hubungan baik dengan warga sekitar maupun orang luar yang melintas di desa tersebut. Bahwa Dusun Rama Dewa merupakan dusun Bali tertua di wilayah Seputih Raman yang masih terjaga dengan baik, dibuktikan dengan berdirinya Monumen Peringatan Transmigrasi Bali yang menandai kedatangan masyarakat Bali ke Desa Rama Dewa pada tahun 1956, yang kemudian dibangun pada tahun 2017 oleh Bupati Lampung Tengah saat itu. Setelah ditelaah lebih lanjut, memang terdapat perbedaan kondisi geografis antara Desa Rama Dewa dengan Provinsi Bali, terutama jika dibandingkan dengan kawasan wisata di Bali. Berbeda dengan Pulau Bali yang mampu menarik wisatawan bukan hanya melalui budayanya tetapi juga keindahan pantainya, Kampung Rama Dewa tidak memiliki potensi wisata pantai karena wilayahnya termasuk Kecamatan Seputih Raman memang bukan daerah pesisir. Budaya di Kampung Rama Dewa tercermin melalui Monumen Transmigrasi yang diresmikan oleh Bupati Lampung Tengah, Mustafa, yang dibangun dengan perpaduan motif khas Lampung dan Bali. Monumen ini menjadi simbol semangat masyarakat setempat, di mana sejak tahun 1958 penyebaran pemukiman di kawasan Rama Dewa semakin meluas, dan sebagian besar penduduknya menganut agama Hindu Bali (Nurlaili, 2024).

Konsep mengenai minoritas tidak luput dari kritik, salah satunya disampaikan oleh Barton Meyers (1968), yang menyoroti kecenderungan para ilmuwan sosial untuk mengabaikan konteks historis dan sosial dalam memahami dinamika kelompok masyarakat. Meyers menilai bahwa istilah

"minoritas" kerap disalahartikan, terutama ketika didekati secara semata-mata kuantitatif. Dalam kajian ilmu perilaku (behavioral science), istilah ini sebenarnya tidak hanya merujuk pada jumlah anggota suatu kelompok, melainkan lebih berfokus pada dimensi kekuasaan sebagai elemen yang paling esensial (Meyers, 1984:8). Dengan demikian, konsep minoritas merefleksikan adanya konstruksi sosial yang sarat dengan bias dan prasangka, yang sering kali mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam struktur sosial yang ada (Meyers 1984: 8).

Meyers (1984) juga menegaskan bahwa istilah kelompok minoritas sebaiknya tidak lagi dipakai sekadar sebagai label umum untuk orang-orang yang mengalami diskriminasi kolektif. Fokus pada jumlah atau kuantitas anggota kelompok dianggap kurang relevan dan justru menutupi ketimpangan kekuasaan (power inequality). Menurutnya, konsep yang tepat adalah konsep yang secara jelas menekankan adanya relasi kekuasaan (power relation) yang memungkinkan keberadaan serta keberlangsungan kelompok tersebut dipertanyakan (Meyers 1984: 11). Konsep ini juga harus mampu menjelaskan proses dominasi dalam ranah ekonomi, budaya, politik, dan sosial. Karena itu, Meyers (1984: 11) menyatakan bahwa individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok dan menjadi sasaran perlakuan diskriminasi, prasangka, serta dominasi dapat dikategorikan sebagai kelompok yang tertindas (oppressed groups).

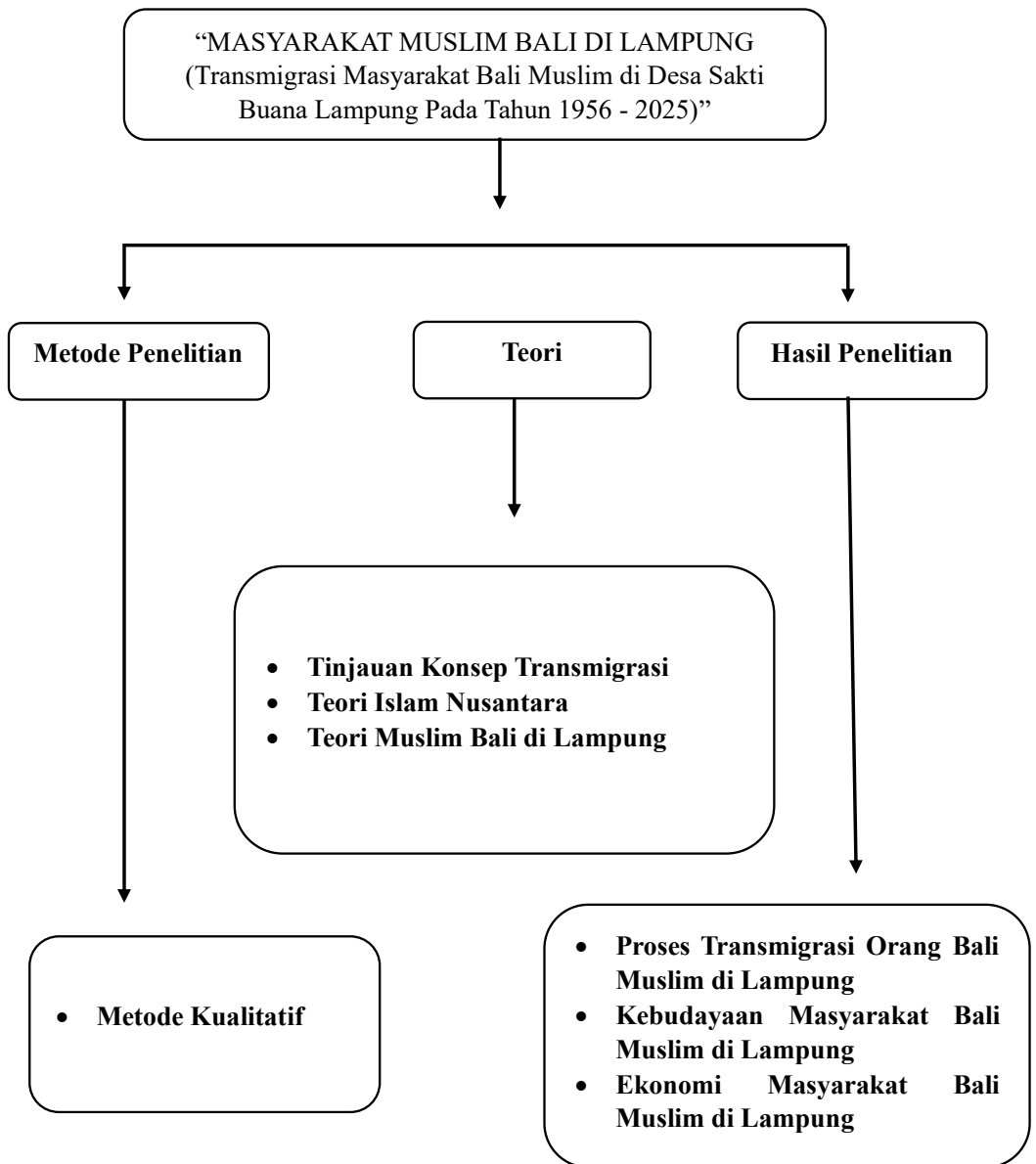
2.2. Kerangka Pemikiran

Pengetahuan dapat dipahami sebagai kumpulan informasi atau ilmu yang dimiliki oleh manusia. Secara epistemologis, pengetahuan memiliki beberapa fungsi utama, antara lain untuk mendeskripsikan fenomena, menjelaskan keterkaitan antar variabel, membuat prediksi, serta memberikan kontrol terhadap gejala-gejala yang diamati. Oleh karena itu, pengumpulan teori dalam suatu penelitian dapat berasal dari berbagai disiplin ilmu, selama teori-teori tersebut relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Dalam konteks penelitian ilmiah, teori berperan penting dalam membangun hipotesis melalui penyusunan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan susunan argumentasi logis yang dibangun berdasarkan teori-teori yang telah ada serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan, guna memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Melalui kerangka ini, peneliti berupaya menyampaikan argumen yang logis dan ilmiah kepada komunitas akademik, sebagai dasar dalam merumuskan dan menguji hipotesis yang diajukan (Budi Susetyo, 2023)

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menganalisa dan menjelaskan pokok masalah yang terjadi. Penelitian ini menganalisa tentang Sejarah terjadinya Transmigrasi orang Bali Islam di Desa Sakti Buana di Wilayah Lampung Tengah. Menjelaskan bagaimana jejak sejarah Orang Bali Islam di Desa Sakti Buana, proses Transmigrasi, menjelaskan tentang kondisi sosial-geografis pendatang (Bali) dengan pribumi (Lampung).

Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah; (1) Teori Transmigrasi, sebuah teori perpindahan penduduk secara berkala untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. (2) Teori Islam Nusantara, sebagai wadah untuk membangun pengetahuan atau keilmuan tentang Islam Nusantara dan menjelaskan tentang praktek ajaran Islam yang khas Nusantara. (3) Teori Islam Bali Lampung, sebuah teori menjelaskan proses masuknya Islam di Lampung dan proses Transmigrasi pada Orang Bali Islam di Lampung.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk digunakan sebagai pembandingan kajian yang akan dibahas, penelitian dengan tema yang sejenis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Aan Budianto, Penelitian yang ditulis oleh Aan Budianto ini berjudul “Sejarah Orang Bali di Lampung 1956 – 1997”, penelitian ini berupa Jurnal dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada penelitian ini membahas mengenai adaptasi ekonomi dan adaptasi budaya orang Bali di Provinsi Lampung dalam rentang waktu 1956-1997. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah kondisi ekonomi menjadi faktor pendorong utama orang Bali menuju Lampung pada tahun 1956. Faktor lain yaitu proses migrasi melalui program pemerintah dan swakarsa.
2. Penelitian oleh Aan Budianto, Penelitian yang ditulis oleh Aan Budianto ini berjudul “Genealogi Moderasi Beragama pada Masyarakat Transmigran Jawa dan Bali dengan Penduduk Asli di Lampung Tengah Tahun 1950-1998” penelitian ini berupa Jurnal yang membahas mengenai Akulturasi Budaya yang terjadi karena faktor keterbukaan yang didasari oleh filsafat hidup masing-masing masyarakat Lampung, Jawa dan Bali.
3. Penelitian oleh Feni Kurniawati Penelitian yang ditulis oleh Feni Kurniawati ini berjudul “Tradisi Muludan pada Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah” penelitian ini berbentuk karya ilmiah berupa Skripsi yang dibuat pada tahun 2023 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung. Yang membahas mengenai Tradisi Muludan pada Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah.
4. Penelitian oleh Anisa Utami, Penelitian yang ditulis oleh Anisa Utami ini berjudul “Resolusi Konflik antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga dan Suku Lampung Desa Agom

Kabupaten Lampung Selatan)” penelitian ini berupa Jurnal dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. yang membahas mengenai Konflik kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Oktober – 29 Oktober 2012 antar Etnis Bali Desa Balinuraga dan Etnis Lampung Desa Agom. Yang diterbitkan Journal of Politic and Government Studies, vol. 3, no.2, pp. 126-135, Mar. 2014.

5. Penelitian oleh Arya Bagaskara, Kiki Muhamad Hakiki, Ratu Vina Rohmatika, Badruzaman, Andi Eka Putra, Penelitian yang ditulis oleh Arya Bagaskara, Kiki Muhamad Hakiki, Ratu Vina Rohmatika, Badruzaman, Andi Eka Putra ini berjudul: “Identitas Kebalian; Rekonstruksi Etnik Bali dalam Mempertahankan Identitas Pasca Konflik”. penelitian ini berupa Jurnal dari Universitas Islam Negeri Lampung dan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Jurnal Studi Lintas Agama, Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021.
6. Penelitian oleh Monika Ata, Agus S. Ekomadyo, Penelitian yang ditulis Monika Ata, Agus S. Ekomadyo ini berjudul “Adaptasi Arsitektur Tradisional Bali pada Tempat-tempat Komunal di Desa Balinuraga, Kalianda, Lampung Selatan”. penelitian ini berupa Jurnal dari Program Study Magister Arsitektur SAPPK Institut Teknologi Bandung. Diterbitkan oleh Jurnal Arsitektur dan Perkotaan “KORIDOR” vol. 09 no. 02, Juli 2018. Metode Penelitian ini dilaksanakan dengan cara pengumpulan data sekunder serta data hasil dari observasi berupa wawancara dengan warga etnis Nusa Penida yang bermukim di salah satu desa Balinurage, Kalianda, Lampung Selatan.
7. Penelitian oleh Ni Luh Nyoman Seri Malini, Penelitian yang ditulis Ni Luh Nyoman Seri Malini ini berjudul “Kebertahanan Bahasa Bali pada Transmigran Bali di Provinsi Lampung” penelitian ini berupa Jurnal dari Universitas UDAYANA. Diterbitkan oleh Linguistik Indonesia, Agustus 2012. Metode Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengikuti alur berfikir fenomenologis, yakni berupa menggambarkan fenomena kehidupan sosial bahasa etnis berdasarkan pandangan mereka sendiri tanpa

adanya standardisasi dan batasan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif etnografis.

8. Penelitian oleh Margana S, Faisol A, Handayani A, Penelitian yang ditulis Margana S, Faisol A, Handayani A ini berjudul “Perubahan Sosial Etnis Bali di Lampung Tengah dalam Perspektif Sejarah” penelitian ini berupa Jurnal dari Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. Disampaikan pada “Seminar untuk Kebhinekaan dan Ke Indonesiaan: Refleksi 60 Tahun Seminar Sejarah Indonesia” di FIB UGM, Desember 2016. Penerbit Ombak, 2017. Hasil Penelitian Seputih Mataram adalah salah satu wilayah Lampung yang terdiri atas berbagai unsur dan budaya, terdapat masyarakat pendatang dan pribumi, dalam hal ini para pendatang kebanyakan adalah Etnis Jawa dan Etnis Bali. Metode Penelitian ini dilaksanakan dengan cara metode historis, langkah-langkah yang ditempuh penelitian dalam menemukan data dalam metode *historis* yakni *Heuristik* adalah kegiatan awal dari seorang peneliti untuk melakukan sebuah penelitian sejarah sebelum menuju ke tahapan selanjutnya.
9. Penelitian oleh Zainal Arifin, Penelitian yang ditulis Zainal Arifin ini berjudul “Kami Bali-Lampung: Politik Identitas Etnik Bali Migran dalam Masyarakat Multikultural Way Kanan, Lampung”. Penelitian ini berupa Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 7 No. 1, Januari-Juli 2020. Metode Penelitian Artikel Ini merupakan hasil kajian antropologis yang dilakukan penulis pada awal tahun 2019, di salah satu komunitas migran Bali yang ada di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, khususnya di Kecamatan Banjit.
10. Penelitian oleh Muhammad Hafidz Trisdianto, Penelitian yang ditulis Muhammad Hafidz Trisdianto ini berjudul “Budaya Masyarakat Bali Koga dalam Hidup Membali di Lampung Selatan”. Penelitian ini berbentuk karya ilmiah berupa Skripsi yang dibuat pada tahun 2024 pada Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Deskriptif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif dikenal berada dalam lingkup paradigma interpretif atau fenomenologis, yang mengadopsi pola pikir dari ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi dan antropologi. Pendekatan ini berakar dari para ahli sosiologi “Mazhab Chicago” pada era 1920–1930, yang menjadi dasar dari segi epistemologi. Fokus utamanya adalah memahami (bukan menjelaskan) berbagai fenomena sosial yang dialami individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Para pelopornya berpendapat bahwa pengalaman bukan sekadar realitas empiris yang objektif, melainkan pelajaran yang dapat diambil dari kejadian yang dialami seseorang. Pemahaman yang menyeluruh dianggap sebagai jalan untuk memperoleh kebenaran, bukan hanya berdasarkan data yang dapat diamati, melainkan juga dari informasi tersembunyi yang digali secara mendalam. Dalam hal ini, akal sehat (common sense) dianggap sebagai sumber penting dalam mencari kebenaran. Kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang khas, tidak bersifat universal, dan dicapai melalui proses induktif. Di Amerika Serikat pada tahun 1960 dan di negara-negara berbahasa Jerman pada 1970-an, paradigma interpretif mengalami perkembangan yang sangat signifikan (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, 2008).

Berdasarkan telaah pustaka, metode penelitian kualitatif memiliki perjalanan historis yang panjang dan mengalami dinamika naik-turun dalam ranah ilmu-ilmu sosial, kesehatan, serta humaniora. Pemaknaan terhadap penelitian kualitatif juga terus berkembang seiring berjalannya waktu. Para perintis metodologi kualitatif pada masa awal merumuskan pengertian yang berbeda dibandingkan dengan interpretasi yang dikemukakan oleh para ahli pada era post-modernisme.

Menurut Kirk dan Miller (1986), penelitian kualitatif awalnya berakar dari pendekatan pengamatan kualitatif yang dianggap berlawanan dengan

pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif berfokus pada pengukuran tingkat atau derajat dari suatu karakteristik tertentu. Untuk mengidentifikasi sesuatu melalui pengamatan, peneliti harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri dari objek tersebut. Dengan pemahaman yang masih terbatas seperti itu, kemudian muncul anggapan bahwa penelitian kuantitatif mencakup segala bentuk penelitian yang menggunakan perhitungan statistik, seperti persentase, rata-rata, chi-kuadrat, dan metode statistik lainnya. Sementara itu, istilah "kualitas" merujuk pada sifat-sifat alami yang kontras dengan konsep "kuantitas" atau jumlah yang menjadi fokus pendekatan kuantitatif.

Penelitian kualitatif dikenal dengan beragam istilah, seperti inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionisme simbolik, perspektif dari dalam, etnometodologi, "Mazhab Chicago", fenomenologi, studi kasus, pendekatan interpretatif, ekologis, dan deskriptif (lihat Bogdan dan Biklen, 1982:3). Sebagian pihak yang memilih menggunakan istilah inkuiri naturalistik atau alamiah sebenarnya kurang sepakat dengan penggunaan istilah "penelitian kualitatif", karena menganggapnya terlalu menyederhanakan konsep yang dimaksud, dan bahkan sering disandingkan secara oposisi dengan pendekatan kuantitatif. Istilah inkuiri alamiah lebih menekankan pada sifat alami dari sumber data yang diteliti. Namun pada dasarnya, alasan yang dikemukakan oleh para pendukung inkuiri alamiah tidak jauh berbeda dengan argumentasi para peneliti yang tetap menggunakan istilah "penelitian kualitatif" (Sarmini et al., 2023).

Terdapat beragam definisi mengenai penelitian kualitatif. Salah satunya dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975:5), yang menjelaskan bahwa "metodologi kualitatif" adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap individu dan lingkungan secara menyeluruh (holistik). Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, individu atau organisasi tidak seharusnya dipisahkan ke dalam

variabel-variabel atau hipotesis tertentu, melainkan harus dilihat sebagai bagian integral dari suatu keseluruhan konteks.

Metode Kualitatif digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan didukung penggalan data melalui metode studi pustaka/studi literatur dari beberapa sumber literatur (tertulis) dan studi lapangan. Skripsi ini ditulis dengan melalui proses penggalan data dari berbagai sumber rujukan yang membahas berbagai artikel/tulisan terkait dengan berbagai literatur mengenai pendekatan kualitatif, terutama yang berkaitan dengan ilmu sejarah. Berbagai sumber ini dapat diakses secara terbuka di berbagai media dan tempat (perpustakaan) secara terbuka. Skripsi ini dapat mengelaborasi berbagai artikel dan tulisan yang terkait. Demikian, artikel dapat menjadi sintesis dari berbagai tulisan yang pernah ada, untuk dapat dilihat hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan dalam konteks saat ini. Dalam konteks “Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana Lampung Tengah pada tahun 1956-2025”, penelitian ini akan mendeskripsikan secara rinci proses Transmigrasi Orang Bali Muslim di wilayah Lampung.

3.2. Sumber Data

Bagi peneliti, dibutuhkan sumber-sumber informasi ilmiah untuk melengkapi penelitian. Dalam dunia perpustakaan, informasi ilmiah dapat dibedakan menjadi 3 bagian besar dalam penelitian ini, yaitu:

3.2.1. Sumber Primer

Sebagaimana dikemukakan oleh Laia (2022), Subagia (2023), dan Tan (2021), data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek yang relevan dengan variabel penelitian. Data ini dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya, seperti responden atau informan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Bentuk data primer dapat berupa hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, maupun pengisian angket atau kuesioner oleh responden. Contoh konkret dari pengumpulan data

primer mencakup wawancara langsung dengan partisipan penelitian, pengamatan secara langsung terhadap objek kajian Undari Sulung, Mohamad Muspawi, 2024).

Informasi dalam observasi penggalan data diperoleh dari dua informan kunci, yaitu Bapak Abdul Syakur sebagai tokoh agama dan Bapak Jamaji selaku Ketua RT 02/RW 02 yang berdomisili di SB 15, Jl. Kampung Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Observasi ini dilaksanakan pada tanggal 6 April 2025.

Dalam kegiatan observasi, peneliti memperoleh keterangan langsung bahwa di Desa Sakti Buana terdapat komunitas Bali Muslim yang terdiri dari sekitar 170 Kepala Keluarga (KK), seluruhnya beragama Islam sejak sebelum proses transmigrasi dari Pulau Bali. Pada awalnya, sekitar tahun 1963, komunitas Bali Hindu dan Bali Muslim tinggal bercampur tanpa pemisahan wilayah. Namun, atas kesepakatan para tokoh agama, disetujui adanya pemisahan tempat tinggal berdasarkan agama, meskipun tetap berdekatan dalam wilayah yang sama. Komunitas Bali Hindu menetap di Dusun 7, sedangkan Bali Muslim menetap di Dusun 2.

Salah satu bentuk perbedaan tradisi Islam yang khas di kalangan masyarakat Bali Muslim terlihat saat perayaan hari besar keagamaan Islam, di mana mereka tetap mengenakan pakaian adat Bali namun melaksanakan ritual keagamaan sesuai dengan syariat Islam.

3.2.2. Sumber Sekunder

Menurut Alir (2005) data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literature, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder

meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. (Undari Sulung, Mohamad Muspawi, 2024)

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Berbagai macam artikel jurnal ilmiah yang membahas sejarah literasi Islam di Nusantara, buku-buku akademik tentang perkembangan literasi sejarah, tesis dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian.

3.2.3. Sumber Tersier

Menurut Adiyanta (2019) data tersier adalah sumber data penelitian yang berfungsi sebagai penunjang atau pendukung bagi data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui sumber yang tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki berkaitan yang relevan. Contoh sumber data tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang topik penelitian. Data tersier tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama atau pihak yang terkait langsung dengan masalah penelitian, tetapi masih memberikan informasi yang berguna untuk memperkaya analisis penelitian. (Undari Sulung, Mohamad Muspawi, 2024).

Sumber data merupakan elemen krusial dalam penelitian karena secara langsung memengaruhi kualitas serta ketepatan hasil yang diperoleh. Secara umum, terdapat tiga jenis sumber data utama yang digunakan dalam proses penelitian, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Masing-masing jenis memiliki fungsi yang spesifik dalam menunjang proses pengumpulan dan analisis informasi.

Data primer menawarkan keunggulan berupa informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, sehingga umumnya

lebih akurat dan relevan. Namun, pengumpulan data primer sering kali membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Sebaliknya, data sekunder biasanya lebih mudah diakses dan lebih hemat sumber daya, tetapi validitas serta kesesuaiannya terhadap fokus penelitian tidak selalu terjamin. Adapun data tersier berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan informasi kontekstual tambahan, meskipun tidak selalu memiliki relevansi langsung terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Oleh karena itu, pemilihan jenis sumber data harus disesuaikan dengan tujuan, cakupan, dan keterbatasan penelitian yang dilakukan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

3.3.1. Studi Dokumen

- Penelusuran literatur database akademik seperti Goggle Scholar, Semantic Scholar, katalog perpustakaan, dan repositori institusional.
- Seleksi sumber berdasarkan kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian.
- Pengorganisasian data menggunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley.

3.3.2. Observasi

- Pengamatan terhadap penggunaan ebook dan platform digital.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Analisis Komparatif

- Membandingkan karakteristik literasi Islam Lampung pada berbagai periode 1956 hingga 2025.

3.4.2. Interpretasi Data

- Menafsirkan temuan dalam konteks peradaban Islam dan literasi Islam Lampung.
- Mengembangkan argumen dan kesimpulan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1. Proses Transmigrasi Masyarakat Bali Islam di Lampung

Deskripsi Wilayah Kampung Sakti Buana RT 02/RW 02 merupakan salah satu unit wilayah yang berada di SB 15, Kampung Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Secara administratif, Kampung Sakti Buana termasuk dalam kawasan Kecamatan Seputih Banyak yang memiliki luas wilayah sekitar 137,9 km², dengan jarak sekitar 36 km dari ibu kota kabupaten. Kampung ini memiliki kode pos 34156 dan merupakan bagian dari 13 kampung/kelurahan yang ada di wilayah kecamatan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa RT 02 dihuni oleh komunitas Bali Muslim yang berjumlah kurang lebih 170 Kepala Keluarga (KK). Seluruh anggota komunitas ini telah memeluk agama Islam sejak sebelum berpindah dari Pulau Bali melalui program transmigrasi. Pada awalnya, pemukiman antara kelompok Bali Muslim dan Bali Hindu belum dipisahkan secara administratif. Namun, pada sekitar tahun 1963, berdasarkan hasil musyawarah tokoh-tokoh agama setempat, disepakati pemisahan wilayah berdasarkan identitas keagamaan. Komunitas Bali Muslim kemudian menetap di Dusun 2, sedangkan komunitas Bali Hindu tinggal di Dusun 7.

Dari segi budaya, masyarakat Bali Muslim di wilayah ini masih mempertahankan unsur-unsur budaya lokal Bali dalam praktik kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk pelestarian budaya tersebut tampak saat pelaksanaan hari besar keagamaan Islam, di mana masyarakat tetap mengenakan pakaian adat Bali namun menjalankan ibadah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara identitas budaya asal dan komitmen terhadap ajaran agama.

Dalam aspek pendidikan, wilayah ini dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dasar, yaitu SD Negeri 2 Sakti Buana, yang menjadi sarana utama pendidikan formal bagi anak-anak di lingkungan sekitar.

Secara umum, RT 02/RW 02 di SB 15 Kampung Sakti Buana mencerminkan dinamika sosial masyarakat transmigran yang berhasil mengintegrasikan budaya asal dengan lingkungan baru tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Keberadaan komunitas Bali Muslim ini turut memperkaya keberagaman sosial dan budaya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dikategorikan sebagai urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Dalam konteks ini, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dipahami sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan melalui pengaturan tata ruang, penataan penduduk, serta pembentukan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya secara terpadu. Implementasinya dilakukan melalui pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi secara menyeluruh.

Transmigrasi diposisikan sebagai salah satu strategi percepatan pembangunan kota-kota kecil di luar Pulau Jawa, guna memperkuat peran wilayah-wilayah tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, pembangunan transmigrasi diharapkan mampu mereduksi ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya antara wilayah perdesaan dan perkotaan, wilayah pedalaman dan pesisir, wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara kawasan timur dan barat Indonesia. Selain itu, transmigrasi juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangga, termasuk keterhubungan antara kota dan desa (Irfan Priyadi, 2024.).

Merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023 dan penyampaian hasil evaluasi perkembangan Kawasan transmigrasi kepada Bappeda Propinsi dan Dinas yang menangani keteransmigrasian Proponsi dan Kabupaten/Kota Nomor 17/PKT.04.04/I/2024. Penyusunan makalah kebijakan mengenai *Optimalisasi Peran Daerah Tujuan Guna Mendukung Peningkatan Ekonomi dan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi* memiliki urgensi strategis yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, capaian status perkembangan kawasan transmigrasi yang masuk dalam kategori berdaya saing, sebagaimana menjadi target prioritas nasional maupun prioritas kementerian terkait, masih tergolong sangat rendah. Kedua, keterlibatan dan dukungan dari pemerintah daerah tujuan transmigrasi dalam upaya peningkatan status kawasan tersebut masih terbatas. Ketiga, efektivitas regulasi yang mengatur kewenangan daerah dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi belum optimal, sehingga implementasi kebijakan di tingkat daerah menghadapi sejumlah hambatan. Keempat, intervensi dari lintas sektor di kawasan transmigrasi belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap tercapainya kawasan transmigrasi yang berdaya saing secara ekonomi dan sosial (Irfan Priyadi, 2024).

Menurut Hardjono (1977:16), akar sejarah program transmigrasi di Indonesia dapat ditelusuri dari kebijakan kolonisasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi tekanan demografis dan tingkat kemiskinan di Pulau Jawa, melalui pemindahan penduduk ke wilayah-wilayah di luar Jawa. Salah satu lokasi awal yang dijadikan permukiman bagi keluarga migran adalah wilayah selatan Pulau Sumatera. Pada tahun 1905, dibuka pemukiman koloni pertama di Gedong Tataan, Provinsi Lampung, yang kemudian diikuti dengan pembukaan kawasan permukiman di dekat Kota Agung pada tahun 1912. Hingga dekade 1930-an, kebijakan relokasi penduduk yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda terus

berlangsung, di mana sebagian besar keluarga migran dipekerjakan dalam sektor perkebunan. Sampai awal 1940-an, sekitar 200.000 penduduk telah dipindahkan dalam program ini. Namun, ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, program kolonisasi tersebut dihentikan (Arndt, 1988; Kebschull, 1986).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengadopsi kembali kebijakan ini dalam bentuk program transmigrasi sebagai bagian dari strategi penyebaran penduduk secara nasional. Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mencanangkan target ambisius untuk memindahkan 31 juta penduduk dalam kurun waktu 35 tahun, yang kemudian dinaikkan menjadi 49 juta pada tahun 1951. Namun, realisasi target tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama karena kondisi politik dan ekonomi nasional yang belum stabil, serta keterbatasan dalam hal aparatur dan sumber pendanaan. Akibatnya, pelaksanaan program transmigrasi pada masa awal kemerdekaan mengalami banyak hambatan (Rohani Budi Prihatin, 2012).

Ketidakseimbangan komposisi antara penduduk pendatang dan masyarakat asli di Provinsi Lampung memunculkan dinamika sosial yang cukup signifikan. Masyarakat adat Lampung mulai merasakan adanya ancaman terhadap hak-hak mereka, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah adat, sehingga memicu munculnya gerakan penolakan terhadap program transmigrasi. Tanda-tanda penolakan ini telah terlihat sejak awal dekade 1950-an, dengan bentuk resistensi masyarakat adat yang enggan menyerahkan tanah ulayat mereka untuk dijadikan lokasi pemukiman bagi para transmigran. Situasi sosial yang tidak stabil ini turut menjadi perhatian Djawatan Ketransmigrasian saat itu. Sebagai respons, sejak tahun 1953, jumlah warga yang dipindahkan ke Lampung mulai dikurangi secara bertahap. Pemerintah kemudian mengalihkan fokus lokasi transmigrasi ke wilayah Sumatera Selatan. Bahkan, pada tahun 1956, ditetapkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman transmigran ke Lampung, guna memberikan waktu bagi pemulihan kondisi sosial masyarakat setempat (Aan Budianto, 2020).

Penolakan terhadap program transmigrasi yang dimotori oleh para tokoh adat Lampung berangkat dari aspirasi agar pemerintah tidak hanya berfokus pada kepentingan para pendatang, tetapi juga memperhatikan masyarakat lokal sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan pemindahan penduduk. Selama ini, perhatian pemerintah dinilai lebih banyak tertuju pada transmigran, yang ditunjukkan melalui pemberian berbagai fasilitas dan subsidi, sementara kebutuhan serta keberlangsungan masyarakat lokal cenderung terabaikan. Lebih lanjut, tokoh-tokoh adat menilai bahwa peningkatan jumlah pendatang telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan, terutama melalui pembukaan lahan secara masif yang merambah hutan dan wilayah adat. Aktivitas pembukaan lahan ini umumnya dilakukan oleh migran swakarsa yang tidak melalui mekanisme transmigrasi resmi (Kampto Utomo, 1975). Gelombang kedatangan transmigran swakarsa ini turut dipicu oleh kebijakan pemerintah yang belum stabil, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya di lapangan. Pada era 1950-an, program transmigrasi kerap mengalami hambatan akibat lemahnya perumusan strategi dan pelaksanaan teknis, yang diperparah oleh seringnya pergantian lembaga pelaksana dalam jangka waktu singkat, yakni satu hingga dua tahun (Tarsi Djojoprpto, 1997: 57). Ketidakpastian kelembagaan ini menyebabkan banyak individu yang mengalami tekanan sosial ekonomi memilih melakukan migrasi secara mandiri tanpa dukungan pemerintah. Akibatnya, arus migrasi masuk ke Lampung meningkat pesat dan menimbulkan permasalahan baru, terutama eksploitasi lahan dan pembukaan hutan secara besar-besaran (Aan Budianto, 2020).

Ketegangan sosial yang berkembang di Lampung sebagai akibat dari program transmigrasi mencapai puncaknya dengan diselenggarakannya Kongres Adat, yang pertama kali dilangsungkan pada Januari 1956 di Palembang dan dilanjutkan pada Maret 1957 di Bukittinggi. Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat adat menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan pemindahan penduduk ke wilayah Lampung. Kongres ini menghasilkan sejumlah tuntutan yang dirumuskan ke dalam sebuah teks

resolusi resmi yang berisi desakan agar pemerintah menghentikan program transmigrasi ke daerah tersebut. Teks lengkap dari resolusi Kongres Bukittinggi ini dipublikasikan dalam surat kabar *Indonesia Raya* edisi 20 Maret 1957.

Pengiriman transmigrasi ke seluruh Sumatera untuk sementara waktu sebaiknya dihentikan. Sebabnya ialah karena kenyataan bahwa perbandingan antara penduduk asli Lampung dengan penduduk imigrasi dalam 40:60. Untuk menghindarkan perasaan tidak puas di antara penduduk Lampung asli, maka transmigran haruslah diperlakukan sama seperti para migran Lampung yang pindah ke daerah lain di Sumatera bila perlu. Hak-hak marga, negeri dan lain atas tanah yang telah ditempati atau dibuka oleh para transmigran harus kembali kepada wewenang marga atau nigari bersangkutan. Semua transmigran yang kini mendiami daerah-daerah transmigrasi harus tunduk pada kekuasaan marga, negeri yang bersangkutan dan sebagainya, serta menjadi anggota masyarakat adat tersebut.

Mulai dari saat ini tekanan harus dijatuhkan pada perbaikan sector-sektor yang penting artinya bagi kepentingan penduduk asli yang jauh ketinggalan dalam semua bidang bila dibandingkan dengan para transmigran. Daerah-daerah transmigrasi yang belum digunakan atau belum dibuka oleh transmigrasi baru, harus dicadangkan bagi penduduk asli yang pindah sebagai transmigran local. Kecuali dari sekarang ini harus dimulai transmigrasi lokal disamping transmigrasi umum dan anggaran dasarnya perlu ditentukan.

Garis-garis kebijakan sekarang tentang transmigrasi perlu ditinjau kembali dan didasarkan atas gagasan atas pendapat daerah-daerah diluar Jawa dimana dilaksanakan transmigrasi itu. Pengiriman transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah keluar Jawa harus terlebih dahulu dirundingkan dengan daerah-daerah itu dan selanjutnya harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan adat daerah yang bersangkutan sedangkan persyaratannya harus ditentukan oleh daerah bersangkutan sendiri. Para pejabat di daerah

transmigrasi sesogyanya harus terdiri dari orang-orang daerah itu sendiri atau setidaknya tidaknya diangkat berdasarkan perundingan dengan penduduk asli (Indonesia Raya, Edisi 20 Maret 1957: 1).

Tuntutan yang muncul dari Kongres tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk negosiasi kolektif yang dapat dipandang sebagai representasi aspirasi masyarakat di wilayah-wilayah tujuan program transmigrasi. Dalam konteks ini, berkurangnya akses suatu kelompok, etnis, atau komunitas terhadap kekuasaan maupun sumber daya strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik, sering kali menjadi faktor penentu dalam mempertahankan eksistensi sosial dan budaya mereka (Aan Budianto, 2020). Kebijakan pemerintah yang cenderung lebih berpihak kepada para pendatang telah berdampak pada perubahan sikap masyarakat lokal yang sebelumnya bersikap terbuka, menjadi lebih reaktif dan menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan tersebut.

Islam di Lampung pada 1552-1570, yang diawali masuknya pengaruh Hindu, kemudian masyarakat Lampung mengenal sistem pemerintahan yang dibahas secara global dengan menunjukkan bukti-bukti yang ditemukan di Lampung. Proses penyebaran Islam di wilayah Lampung tidak serta-merta diterima oleh masyarakat setempat. Bahkan, komunitas Lampung yang memeluk Islam masih menunjukkan pengaruh budaya Hindu yang cukup kuat. Pada masa pengaruh Hindu, wilayah Lampung telah menjalin hubungan dengan dunia luar. Husin Sayuti (1985) mencatat bahwa peninggalan berupa keramik dari Dinasti Han telah ditemukan di Lampung, sebagai bukti adanya kontak dengan peradaban Tiongkok. Selain itu, dalam catatan sejarah Dinasti T'ang disebutkan bahwa utusan dari Ho-Lo-Yeu pernah mengunjungi Tiongkok bersama perwakilan dari Tolang Phohwang—sebuah nama yang kemudian diidentifikasi sebagai Tulang Bawang, yaitu nama sungai yang saat ini mengalir di Kabupaten Lampung Utara, tepatnya melintasi wilayah Kota Menggala (Nanik Junaidah, 2008).

Masuknya Islam ke wilayah Lampung diperkirakan terjadi sekitar abad ke-15 melalui tiga jalur utama. Pertama, melalui wilayah Minangkabau yang

kemudian menyebar ke daerah dataran tinggi Belalau. Kedua, dari arah Palembang yang mencapai wilayah Komering, yang diduga terjadi pada awal abad ke-15 atau setidaknya pada masa kekuasaan Adipati Arya Damar sekitar tahun 1443. Ketiga, penyebaran datang dari Banten melalui peran Fatahillah atau Sunan Gunung Jati yang memasuki wilayah Labuhan Maringgai, dan diketahui bahwa pengaruh Banten merupakan yang paling signifikan dalam proses Islamisasi di Lampung (Hadikusuma, 1977/1978).

Dalam *Sejarah Raden Intan* disebutkan bahwa Fatahillah, pendiri Kesultanan Banten, pernah mengunjungi Lampung dan menikah dengan Putri Sinar Alam, anak dari Minak Raja Jalan yang merupakan penguasa Keratuan Pugung (kini masuk wilayah Jabung, Lampung Timur). Dari pernikahan ini lahir seorang anak bernama Hurairi, yang setelah menunaikan ibadah haji mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih (Nanik Junaidah, 2008). Tempat penyebaran Islam di daerah Lampung yang pertama berada di daerah pugung yang termasuk dihuni oleh orang Islam, dan setelah itu akhirnya dengan berdirinya Keratuan Darah Putih, maka secara berangsur orang-orang pinggiran di pantai selatan memasuki agama Islam.

Falsafah hidup masyarakat Islam di Lampung secara kultural dapat dibedakan ke dalam dua entitas adat utama, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibatin, yang juga dikenal sebagai Lampung Peminggir. Oleh karena itu, wilayah Lampung dikenal dengan sebutan *Sai Bumi Ruwa Jurai*, yang berarti satu wilayah yang dihuni oleh dua kelompok adat. Dari aspek linguistik, masyarakat Lampung juga terbagi berdasarkan dua dialek utama, yaitu dialek 'A' dan dialek 'O'. Dialek 'A' umumnya digunakan oleh komunitas Lampung Saibatin dan sebagian masyarakat Pepadun seperti di daerah Way Kanan, sementara dialek 'O' lebih dominan di kalangan masyarakat Lampung Pepadun (Himiyari Yusuf, 2016).

Baik masyarakat Lampung yang menganut adat Pepadun maupun Saibatin memiliki sistem filsafat hidup yang khas. Falsafah hidup yang paling dikenal adalah *Piil Pesenggiri*. Istilah *Piil Pesenggiri* sendiri memiliki beberapa variasi

penulisan dan pelafalan, seperti *gikhi*, *gighi*, dan *giri*. Dalam tulisan ini, penulisan *giri* dipilih untuk menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat non-etnis Lampung. Meskipun terdapat perbedaan dalam istilah atau ejaan, secara esensial tidak terjadi perubahan terhadap makna dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya (Himyari Yusuf, 2016).

Menurut Julia Maria, sebagaimana dikutip oleh Himyari Yusuf (2013), sistem filsafat hidup yang paling menonjol dan berakar kuat dalam adat masyarakat Lampung adalah *Piil Pesenggiri*. Falsafah ini menjadi dasar nilai-nilai kehidupan dan pedoman perilaku sosial masyarakat Lampung dalam menjunjung harga diri, kehormatan, serta tata hubungan sosial yang harmonis. Kata *Piil* itu sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti ‘perilaku’ dan *Pesenggiri* berarti keharusan ‘bermoral tinggi’ berjiwa besar, tahu diri serta tahu akan berbagai kewajibannya (Himyari Yusuf, 2016).

Jika kedua kata istilah *Piil Pesenggiri* disatukan, maka filsafat hidup dapat dimaknai, sebagai berikut:

“keharusan berperilaku sopan santun atau bermoralitas, serta berjiwa besar, dan memahami kedudukannya di tengah-tengah makhluk kesemestaan lainnya”.

Koherensi Nilai Islam dalam Falsafah Hidup *Piil Pesenggiri* pada Masyarakat Lampung Pepadun Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, falsafah hidup *Piil Pesenggiri* dalam masyarakat Lampung Pepadun mengandung nilai-nilai Islam yang dapat diidentifikasi ke dalam delapan unsur utama dan dirumuskan secara konseptual menjadi tiga nilai dasar (fundamental). Nilai-nilai tersebut secara implisit tercermin dalam empat pilar pendukung utama *Piil Pesenggiri*, yakni *Bejuluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, dan *Sakai Sambayan*.

Menurut M. Quraish Shihab (1992), prinsip kesetaraan dan kebersamaan merupakan ajaran fundamental dalam Islam. Dalam karya *Membumikan Al-*

Qur'an, Quraish Shihab menekankan bahwa seorang Muslim harus memiliki kepekaan sosial terhadap kondisi masyarakatnya baik dalam situasi menyenangkan maupun menyedihkan dan tidak bersikap apatis. Ia menegaskan bahwa terdapat puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi yang menggambarkan hubungan erat antara keimanan dengan rasa empati, solidaritas, serta semangat kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pandangan Quraish Shihab tersebut mengindikasikan bahwa prinsip kesetaraan dan kebersamaan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Secara filosofis, kesetaraan dan kebersamaan dapat dianggap sebagai fondasi utama dalam membentuk relasi sosial yang harmonis, seperti kekeluargaan, kerukunan, dan keadilan. Dengan demikian, tanpa adanya pengakuan dan internalisasi terhadap nilai-nilai tersebut, maka sangat kecil kemungkinan terciptanya ikatan kekeluargaan, kehidupan yang rukun, dan keadilan sosial sebagaimana yang menjadi esensi dari prinsip *Piil Pesenggiri*.

Terkait hal tersebut diatas, Rasulullah dalam Haditsnya mengatakan *“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”*. Hadits ini sangat jelas maknanya, bahwa prinsip kesamaan dan kebersamaan merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat manusia, khususnya bagi umat muslim, baik secara individu maupun masyarakat. Pentingnya kebersamaan manusia dijelaskan dalam Firman-Nya.

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Ali Imran: 103).”

Selain penjelasan sebelumnya, *Piil Pesenggiri* sebagai filsafat hidup juga dijelaskan oleh Maran (dalam Himyari Yusuf), bahwa pada dasarnya filsafat hidup berkaitan erat dengan eksistensi manusia di dunia dan relasinya dengan Tuhan. Dalam pandangan Facharuddin dan Suryadi, *Piil Pesenggiri* tidak hanya merepresentasikan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mencakup hubungan horizontal antara sesama manusia serta hubungan ekologis antara manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, secara substansial, *Piil Pesenggiri* tidak hanya memuat nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai ketuhanan (*teosentrisme*) yang menjadi landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat Lampung (Himyari Yusuf, 2016).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa nilai-nilai fundamental filsafat hidup *Piil Pesenggiri* bukan hanya terkandung dalam *Piil Pesenggiri* saja, akan tetapi juga terdapat pada keempat unsur pendukungnya, yaitu *Bejuluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, dan *Sakai Sambayan*. Zubaidi Mastal yang dikutip Himyari Yusuf mengemukakan bahwa *Bejuluk Adek* berarti bernama dan bergelar, *Nemui Nyimah* berarti ramah dan terbuka, *Nengah Nyappur* berarti bergaul dan bermasyarakat, *Sakai Sambaian* berarti tolong menolong dan gotong royong. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan wawasan dan kebudayaan nasional, dan dapat dipastikan tidak bertentangan dengan dasar-dasar ajaran agama, terkhusus agama Islam.

Kearifan Lokal Islam Kultural Lampung sebagai Sumber Pembelajaran Toleransi melalui *Piil Pesenggiri* Kebudayaan merupakan simbol dan identitas yang melekat pada suatu wilayah atau kota dalam sebuah bangsa yang terus berkembang. Melalui adat istiadat yang berlaku di tiap daerah, masyarakat dapat mengeksplorasi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sekaligus menemukan kearifan lokal yang luhur yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Namun demikian, penggalan terhadap nilai-nilai budaya ini bukanlah hal yang mudah, sebab terdapat banyak batasan konseptual yang bersumber dari perbedaan bahasa, latar sejarah, dan literatur yang beragam,

baik dalam bentuk fisik maupun abstrak dalam suatu komunitas (Deni Eko Setiawan dkk., 2019).

Menurut Dhanu Priyo Prabowo (2003:9), perkembangan Islam di Lampung tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya lokal. Di satu sisi, Islam berkembang dan berinteraksi dengan budaya Lampung; di sisi lain, budaya Lampung juga mengalami proses internalisasi nilai-nilai keislaman yang memperkaya khazanah kebudayaannya. Hal ini tercermin dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, *Piil Pesenggiri*, yang salah satu prinsip utamanya adalah *Bajuluk Buadok*. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu dalam komunitas adat memiliki gelar kehormatan, yang disebut *adok* atau nama kepangkatan dalam sistem sosial masyarakat adat. Gelar ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai pengingat moral agar setiap individu menjaga perilaku, martabat, dan kehormatannya di tengah masyarakat.

Menurut Cathrin, (2022) Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki sejarah Panjang dalam penyebaran Islam di wilayah Sumatera bagian selatan, telah mengembangkan berbagai bentuk ekspresi sastra lisan yang khas dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Proses Islamisasi di Lampung yang berlangsung sejak abad ke-16 telah melahirkan tradisi sastra lisan yang menggabungkan unsur-unsur budaya Melayu, Jawa dan lokal Lampung dengan nilai-nilai keislaman dalam suatu harmoni yang unik. Tradisi-tradisi ini tidak hanya berkembang di kalangan elite agama atau bangsawan saja, tetapi juga meresap dalam kehidupan masyarakat biasa sebagai bagian integral dari aktivitas sosial, ritual keagamaan, dan upacara adat. Keberagaman suku dan budaya di Lampung yang meliputi suku Lampung asli, pendatang dari Jawa, Sunda, Bali, dan daerah lainnya, telah memperkaya dinamika perkembangan sastra lisan Islam dengan berbagai pengaruh dan adaptasi yang menciptakan warna lokal yang sangat khas dan berbeda dari daerah lain di Indonesia (Kurniawan & Hartati, 2025).

Menurut Martiara, (2017) di antara berbagai bentuk sastra lisan Islam yang berkembang di Lampung, tradisi Cangget menempati posisi yang sangat

istimewa dan signifikan dalam kehidupan masyarakat Muslim Lampung. Cangget, yang secara etimologis berasal dari Bahasa Arab “qasidah” yang syair atau puisi yang dibawakan dengan irama dan melodi khas yang menggabungkan unsur-unsur musikal tradisional Lampung dengan nuansa Islami. Tradisi ini tidak hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga merupakan medium dakwah yang efektif, sarana pendidikan nilai-nilai keislaman, dan wahana pelestarian bahasa serta budaya Lampung. Keunikan Cangget terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan-pesan religius yang mendalam melalui Bahasa simbolik dan metaforik yang indah, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh masyarakat awam sekaligus memberikan pengalaman estetik yang mendalam bagi para penikmatnya (Kurniawan & Hartati, 2025).

Evolusi tradisi Cangget dalam konteks sejarah peradaban Islam Lampung menunjukkan dinamika yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Dari masa-masa awal perkembangannya yang erat kaitannya dengan proses dakwah dan penyebaran Islam di Lampung, Cangget telah mengalami berbagai transformasi baik segi bentuk, isi, maupun fungsi sosialnya. Pada periode awal, Cangget lebih banyak berfungsi sebagai medium dakwah yang digunakan oleh para ulama dan tokoh agama untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang sebagian besar masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Lampung, fungsi Cangget mulai berkembang menjadi sarana hiburan dalam berbagai upacara adat, perayaan keagamaan, dan acara-acara sosial lainnya. Transformasi ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas tradisi Cangget dalam merespon perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertahankan esensi nilai-nilai keislaman yang menjadi ruh dari tradisi ini.

Simbol Islam dan Budaya dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun
Setiap kelompok etnis memiliki kebudayaan yang unik dan membedakan satu sama lain. Kekhasan tersebut tercermin dalam budaya lokal (*local culture*) yang

mengandung nilai-nilai khas dan menjadi bagian dari *local indigenous knowledge* yang dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakatnya. Demikian pula dengan masyarakat etnis Lampung, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya lokal yang mereka miliki. Budaya Lampung merupakan salah satu warisan budaya lokal yang memiliki kontribusi penting dalam mozaik kebudayaan nasional, mengingat etnis Lampung termasuk ke dalam kelompok etnis besar di Indonesia.

Keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan budaya Lampung menjadi signifikan karena mayoritas masyarakat Lampung menganut agama Islam. Hal ini menjadikan integrasi antara ajaran Islam dan praktik budaya lokal, khususnya dalam kehidupan sosial-keagamaan seperti pernikahan, sebagai topik yang relevan untuk dikaji. Dalam konteks masyarakat Lampung Pepadun, praktik perkawinan memiliki bentuk-bentuk yang mencerminkan perpaduan nilai adat dan agama, di antaranya adalah: (1) *perkawinan jujur*, (2) *perkawinan semande*, dan (3) *perkawinan pineng ngerabung sanggar*. Ketiga bentuk ini tidak hanya merepresentasikan sistem kekerabatan dan struktur sosial, tetapi juga mencerminkan harmonisasi antara ajaran Islam dan adat Lampung dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari (Ahmad Isnaeni & Kiki Muhamad Hakiki, 2016).

Sejarah masuknya Islam di Bali, yang dikenal sebagai pulau dengan penghuni mayoritas Hindu, ternyata terdapat pula masyarakat Muslim yang telah beradab lamanya tinggal disana dan hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu. Sejarah masuknya Islam di Bali ternyata berbeda-beda di setiap kabupaten dan memiliki eunikan tersendiri. Berdasarkan catatan sejarah, disebutkan bahwa Islam masuk ke Bali sejak abad ke-14, tempatnya di Kampung Gelgel, Kabupaten Klungkung. Berdasarkan cerita rakyat turun-temurun, cikal bakal orang Islam pertama yang datang ke Gelgel (pusat pemerintahan di Bali sejak abad ke-14) adalah para pengiring *Dalem* dari Majapahit yang berjumlah 40 orang, pada masa pemerintahan Dalem Ketut Ngelesir, Raja Gelgel I. Raja Dalem Ketut yang masih termasuk dinasti

Majapahit mendirikan Kerajaan Gelgel, yang pada saat itu masih dibawah naungan kerajaan Majapahit. Dikisahkan, setelah Majapahit runtuh, datanglah Ratu Dewi Fatimah dari Majapahit yang beragama Islam dengan niat untuk mengajak Raja Waturenggong (Raja Gelgel yang memerintah saat itu) memeluk Islam dan bersedia menjadi istri apabila Raja menjadi Muslim. Konon, upaya Ratu Dewi Fatimah gagal karena upaya yang semestinya mengkhitan Raja ternyata tidak mampu memutuskan bulu kaki Raja. Akhirnya Ratu Dewi Fatimah kembali ke Loloan (kabupaten Jembrana) tempat pertama saat beliau mendarat. Setelah Ratu Dewi Fatimah meninggal, para penggiringnya kembali ke Gelgel dan bermukim di sana dan sejak saat itulah terdapat pemeluk Islam di Gelgel (Kartini, 2011).

Pluralitas Masyarakat Muslim di Bali dan Interaksi Sosial Antarumat Beragama Keberadaan komunitas Muslim di Bali menunjukkan sifat pluralistik yang tinggi, mengingat komunitas ini terdiri dari berbagai latar belakang etnis seperti Jawa, Madura, Bugis, keturunan India, dan keturunan Arab. Penyebaran komunitas Muslim ini teridentifikasi di sejumlah wilayah, antara lain di Kusamba (Klungkung), Kampung Kepoan, Kampung Arab, Kampung Sanglah, dan Kampung Jawa (Badung), serta Pulukan (Jembrana). Selain itu, permukiman Muslim juga terdapat di Pegayaman, Tegallinggah, Bandar Jaya, Kampung Islam, Kampung Bugis, dan Kampung Kejanan (Buleleng), serta Loloan Barat, Loloan Timur, Kampung Pangembangan, dan Banyubiru (Negara).

Di tengah dominasi pemeluk agama Hindu yang mencapai sekitar 93 persen dari total populasi Bali, interaksi lintas agama berlangsung secara harmonis. Umat Hindu kerap melibatkan umat Islam dalam kegiatan keagamaan dan sosial-kemanusiaan, yang dalam praktiknya sering kali menyatu dengan aktivitas spiritual mereka. Keterlibatan ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap eksistensi komunitas Muslim di wilayah yang dianggap sebagai tanah leluhur masyarakat Hindu Bali (Rinaldi Permana Putra, 2023).

Umat Muslim di Bali yang hidup berdampingan dengan umat Hindu dan lainnya menjalin toleransi yang sangat baik dan kuat. Masing-masing dari mereka sering mengadakan kegiatan dan saling membantu satu sama lain. Gotong-royong, berbagi makanan, dan doa Bersama menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh umat Muslim dan Umat Hindu di Bali. Maka, dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan, persaudaraan serta toleransi yang mereka miliki sangat kuat dan harus dicontoh oleh umat lainnya.

Akulturası Budaya Islam dan Hindu dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Bali. Pulau Bali, yang dikenal sebagai *God's Island* atau Pulau Dewata, merupakan wilayah yang kaya akan warisan budaya dan tradisi, menjadikannya sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia. Sejak masuknya Islam ke Bali dan berkembangnya komunitas Muslim di wilayah ini, terjadi proses akulturası budaya antara umat Islam dan Hindu yang menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan khas dalam kehidupan masyarakat Bali. Di Kabupaten Jembrana, misalnya, ditemukan berbagai ekspresi budaya yang merupakan hasil perpaduan harmonis antara unsur Islam dan Hindu. Akulturası ini mencerminkan integrasi sosial yang kuat dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dan budaya dapat berinteraksi secara positif dalam membentuk identitas lokal yang inklusif (M. Abdul Karim, 2011).

Toleransi Beragama dan Integrasi Sosial Islam-Hindu di Jembrana. Menurut Muhammad Sauki (2015), praktik toleransi antarumat beragama di wilayah Jembrana, khususnya antara komunitas Muslim dan Hindu, menunjukkan tingkat kohesi sosial yang tinggi. Budaya Islam yang berkembang di daerah ini mengedepankan sikap saling menghargai perbedaan, sehingga keberadaan umat Islam dapat diterima secara terbuka oleh masyarakat Hindu setempat. Relasi sosial yang harmonis antara kedua kelompok tercermin dalam interaksi kehidupan sehari-hari, seperti saling mengunjungi dalam acara keagamaan maupun sosial, serta adanya kesadaran lintas agama dalam memenuhi ketentuan agama masing-masing. Misalnya, dalam konteks jamuan makanan, umat Hindu yang menjadi tuan rumah akan memastikan makanan

halal dengan meminta umat Islam sendiri yang mengolahnya. Praktik ini mencerminkan bentuk konkret dari toleransi yang bersifat partisipatif dan berbasis pada penghormatan nilai-nilai keagamaan masing-masing pihak (M. Abdul Karim, 2011).

Demikian pula dengan terjadinya pernikahan antara gadis Hindu dan pemuda Islam, membuat semakin banyak gadis Hindu yang menjadi Muslimah, membuat hubungan kekeluargaan semakin baik, bahkan sampai pada kegiatan gotong royong, kalau ada orang Hindu yang membangun rumah, orang Islam membantu begitu pula sebaliknya jika ada orang Islam membangun rumah orang Hindu juga membantu.

4.2. Kebudayaan Masyarakat Bali Islam di Lampung

4.2.1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Masyarakat Lampung Barat

Tradisi *bediom* merupakan sebuah upacara adat yang dilakukan saat seseorang atau keluarga berpindah ke tempat tinggal baru. Rumah yang dituju bisa berupa hunian yang baru selesai dibangun maupun rumah yang baru saja dibeli. Dengan demikian, pemilik rumah akan menempati kediaman baru miliknya. Tradisi ini merupakan bagian dari warisan budaya suku Lampung yang masih terus dijaga hingga kini. Meskipun tidak semua individu atau keluarga yang melakukan pindah rumah menyelenggarakan tradisi *bediom*, tetapi masih banyak masyarakat yang tetap melestarikannya sebagai bagian dari kebudayaan lokal (Dendi Ari Sulendra, 2023).

Pelaksanaan tradisi *bediom* dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Pada tahap persiapan, segala kebutuhan dan perlengkapan yang diperlukan untuk upacara *bediom* dipersiapkan oleh pemilik rumah. Beberapa perlengkapan yang disiapkan antara lain alat musik, lampu, perlengkapan tidur, mushaf al-Qur'an, serta sajadah. Seluruh barang tersebut menjadi simbol bahwa rumah tersebut akan segera dihuni

oleh pemilik barunya. Selain perlengkapan, pemilik rumah juga menyediakan berbagai jenis makanan seperti nasi dalam periuk yang telah diaduk, ketan kuning atau *sekunyit*, *tintin* (kelapa parut yang dicampur dengan gula), ayam panggang, beras kuning, dan air putih.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *bediom* mengandung banyak nilai pendidikan Islam. Tradisi ini bukan sekadar praktik budaya, melainkan juga sarat dengan unsur keagamaan. Melalui analisis terhadap data lapangan, peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan *bediom* oleh masyarakat Lampung Pesisir Saibatin terdapat sejumlah nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu nilai tauhid, nilai syariah, serta nilai akhlak.

Menurut Muhtadi Muhtadi (2020), salah satunya yaitu terdapat nilai-nilai tauhid dalam tradisi *bediom* tercermin melalui doa-doa yang dilantunkan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, tradisi ini terdiri dari rangkaian doa bersama yang bertujuan memohon perlindungan bagi penghuni rumah agar terhindar dari mara bahaya, senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kenyamanan, serta menjadikan rumah tersebut sebagai tempat berlindung dan sarana untuk beribadah sehari-hari.

Ritual doa ini menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengenalkan pendidikan tauhid sejak usia dini. Tradisi *bediom* yang kaya akan muatan pendidikan tauhid ini bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan konsep ketuhanan melalui pengenalan nilai-nilai dasar tauhid, keteladanan, pembiasaan, dan penyampaian nasihat yang membangun. Secara keseluruhan, pengenalan nilai-nilai tauhid kepada anak merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan sejak usia dini.

4.2.2. Adat Istiadat Umat Beragama di Lampung

1. Tradisi Pernikahan

Zizah Apriyani (2018), Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah tujuan program transmigrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan penduduk di berbagai daerah. Kehadiran para transmigran di wilayah ini menjadikan Lampung sebagai daerah yang bersifat heterogen. Keberagaman tersebut terlihat dari hadirnya berbagai suku yang membawa adat, budaya, serta latar belakang etnis yang berbeda. Dalam kehidupan bermasyarakat yang diwarnai oleh perpaduan budaya, adat, dan tradisi di wilayah transmigran, muncul berbagai perubahan dalam pola tradisi masyarakat. Meskipun demikian, sebagian tradisi masih tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat. Namun, tidak semua perubahan tradisi membawa dampak positif. Beberapa di antaranya justru menyebabkan berkurangnya nilai-nilai etnis yang sebelumnya ada. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan budaya dan kebiasaan masyarakat antara lain adalah proses asimilasi, transmigrasi, dan modernisasi (Rini Dwi Rahayu, 2019).

Menurut Irwan Yudianto (2018), Kebudayaan mencakup segala bentuk pengetahuan yang dimiliki manusia dan digunakan untuk memahami serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, yang kemudian menjadi dasar dalam bertindak laku. Suku Jawa, sebagai salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, tersebar hampir di seluruh penjuru nusantara. Seperti halnya suku lainnya di Indonesia, suku Jawa memiliki kekayaan tradisi, adat istiadat, dan budaya yang beragam. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bahasa hingga keyakinan agama. Salah satu bentuk tradisi khas

yang dimiliki oleh masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan *tradisi kejawen*.

Menurut Azizah Apriyani (2018), Selain suku Jawa, suku lain yang ikut dalam program transmigrasi ke Provinsi Lampung adalah suku Sunda dan suku Bali. Suku Sunda berasal dari Provinsi Jawa Barat dan dikenal sebagai kelompok etnis yang memiliki sifat terbuka serta tingkat toleransi yang tinggi. Keberagaman masyarakat di Lampung turut memengaruhi perubahan dalam tradisi suku Sunda. Salah satu contohnya terlihat dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Jika sebelumnya prosesi seserahan dan lamaran dilakukan secara terpisah, kini keduanya sering digabungkan dalam satu acara. Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu dan mengurangi biaya penyelenggaraan. Selain itu, prosesi adat siraman hanya dilaksanakan oleh calon pengantin perempuan, sementara di kediaman mempelai pria biasanya hanya diadakan acara yasinan.

Menurut Mohammad Dokhi (2016), Salah satu suku yang ikut serta dalam program transmigrasi ke Provinsi Lampung adalah suku Bali. Suku ini berasal dari Denpasar, Bali, yang juga dikenal sebagai Pulau Dewata. Tempat ibadah umat Hindu, yaitu pura, dibangun dengan keindahan artistik, dihiasi ornamen dan dekorasi yang sarat dengan kisah-kisah religius. Dalam masyarakat Hindu, terdapat berbagai upacara yang diselenggarakan berdasarkan kalender tradisional kuno, dan setiap pelaksanaan upacara tersebut diiringi dengan penggunaan pakaian adat.

Orang Bali dikenal ramah, namun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mereka tetap teguh memegang nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka meyakini bahwa dengan mempertahankan tradisi dan adat istiadat, mereka akan dapat menjalani kehidupan yang harmonis dan damai. Seperti

halnya daerah lain di Indonesia yang memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya, masyarakat Bali pun memiliki tradisi khas dalam pernikahan, salah satunya adalah tradisi ngerorod.

2. Tradisi Upacara Kematian

Dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam: Perspektif Interaksi Simbolik pada Masyarakat Karya Maju XII, Lampung Barat. Bagi masyarakat Karya Maju XII, tradisi kematian dipandang sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi orang yang telah wafat. Tradisi ini diekspresikan melalui berbagai simbol yang dimaknai secara mendalam berdasarkan kesepakatan bersama, dengan tujuan untuk pensucian diri, memperoleh perlindungan, serta menghindari gangguan dari hal-hal yang tidak kasat mata (Atika Nurwan Indriani, 2022).

Menurut Kuntowijoyo yang mengutip pada Fikri Ar, manusia hidup dalam tiga jenis lingkungan, yaitu lingkungan material, sosial, dan simbolik. Lingkungan material mencakup hal-hal fisik seperti jembatan, bangunan, pasar, rumah sakit, atau auditorium. Sementara itu, lingkungan sosial berkaitan dengan status dan stratifikasi sosial, serta bisa juga berupa slogan atau julukan yang terbentuk dari persepsi kolektif masyarakat terhadap seorang tokoh. Adapun lingkungan simbolik merujuk pada keberadaan tanda-tanda atau simbol-simbol yang mengelilingi individu dari berbagai sisi dalam bentuk yang beragam. Hal ini juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Karya Maju XII, Lampung Barat, yang hingga kini masih mempertahankan tradisi upacara kematian sebagai bagian dari lingkungan simbolik mereka.

Menurut Amir, jumlah warga di Desa Karya Maju XII mencapai 117 kepala keluarga, yang sebagian besar merupakan pendatang atau perantau, dengan mayoritas berasal dari suku Jawa dan seluruhnya menganut agama Islam. Ia juga menyampaikan

rasa syukur karena seluruh warga selalu ikut serta dalam prosesi melayat dan gotong royong saat ada anggota masyarakat yang meninggal dunia.

4.3. Ekonomi Masyarakat Islam Lampung

1. Kunjungan Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lampung

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2013), Provinsi Lampung memiliki beragam destinasi wisata yang mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung, seperti Lembah Hijau, Pantai Mutun, Klara, Duta Wisata, dan banyak lagi lainnya. Salah satunya adalah objek wisata Lumbok Resort yang berlokasi di Pekon (desa) Lombok, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, yang terletak di wilayah paling ujung Provinsi Lampung.

Menurut Mat Sukri (2017), Lumbok Resort sangat cocok bagi para wisatawan yang menyukai tantangan dan petualangan, karena akses menuju lokasi ini melewati rute yang berbukit dan berlembah. Selain itu, Lumbok Resort dikenal akan keindahan panorama danaunya yang terletak di kaki Gunung Seminung, menciptakan suasana yang damai dan menenangkan bagi para pengunjung (*Ekonomi Wisata*, n.d.)).

Secara garis besar, pengembangan sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat, di antaranya: mendorong pertumbuhan urbanisasi akibat pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata di wilayah tujuan; menggerakkan berbagai sektor industri yang berkaitan dengan pelayanan wisata, seperti transportasi, akomodasi, perhotelan, restoran, seni budaya lokal, hingga industri mebel. Selain itu, meningkatnya jumlah wisatawan juga mendorong konsumsi terhadap produk-produk budaya, yang pada akhirnya berdampak pada pemerataan pendapatan masyarakat. Sektor ini juga dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan usaha, menjadi salah satu upaya pemerintah

dalam meningkatkan penerimaan devisa negara, serta memperluas pasar untuk produk-produk lokal dalam negeri.

2. Usaha Tani Kopi di Pekon Kegeringan, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat

Menurut Jui Rompas (2015), Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai sumber mata pencaharian utama maupun sebagai pilar dalam proses pembangunan. Sektor pertanian mencakup berbagai subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian. Oleh sebab itu, sektor ini memegang peran penting dalam perekonomian nasional.

Menurut Hidayani (2018), Provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi komoditas pertanian terbesar. Beberapa hasil utama dari sektor ini meliputi: pertama, perkebunan milik swasta yang menghasilkan kelapa sawit, karet, tebu, kelapa, dan lainnya. Kedua, perkebunan rakyat yang mencakup komoditas seperti kopi, lada, cengkeh, tembakau, dan berbagai hasil pertanian lainnya.

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan di sektor perkebunan yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian. Komoditas ini berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, menjadi sumber penghasilan, serta menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor. Berdasarkan data dari Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) tahun 2012, sekitar 67% dari total produksi kopi nasional diekspor, sementara 33% sisanya digunakan untuk konsumsi domestik. Dari jumlah kopi yang diekspor, sekitar 70% berasal dari Provinsi Lampung, yang menegaskan posisi Lampung sebagai salah satu pusat utama produksi kopi di Indonesia (Kiki Mirwansyah, 2019).

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat Bali Islam dalam konteks transmigrasi, dengan fokus pada komunitas yang bermukim di RT 02/RW 02 SB 15 Kampung Sakti Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, sejak masa kedatangan pada tahun 1956 hingga perkembangan terakhir pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa proses transmigrasi masyarakat Bali Islam ke wilayah ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam rangka redistribusi penduduk dari daerah padat ke wilayah yang relatif belum berkembang. Masyarakat Bali Islam yang mengikuti program ini berasal dari latar belakang sosial keagamaan yang kuat, dengan identitas Islam yang telah terbentuk sebelum keberangkatan dari Bali.

Pada periode awal transmigrasi (1956–1963), komunitas Bali Islam dan Bali Hindu menempati wilayah permukiman yang sama. Namun, perbedaan dalam praktik keagamaan dan kebutuhan untuk menjalankan ajaran agama secara lebih kondusif mendorong munculnya kesepakatan dari para tokoh agama untuk memisahkan wilayah tinggal berdasarkan agama. Sejak sekitar tahun 1963, masyarakat Bali Islam ditempatkan di Dusun 2, sedangkan masyarakat Bali Hindu menempati Dusun 7. Pemisahan ini bukan merupakan bentuk konflik, melainkan strategi komunitas untuk menciptakan ketertiban sosial dan kenyamanan dalam menjalankan keyakinan masing-masing.

Dalam jangka panjang (1963–2025), komunitas Bali Islam di RT 02/RW 02 menunjukkan keberhasilan dalam membangun kehidupan sosial yang stabil, adaptif, dan harmonis. Mereka mampu mempertahankan identitas keagamaan sebagai Muslim, sekaligus tetap menjunjung nilai-nilai budaya Bali. Salah satu bentuk akulturasi tersebut terlihat dalam tradisi perayaan hari besar Islam, di mana masyarakat Bali Islam tetap mengenakan pakaian adat

Bali sebagai simbol penghormatan terhadap budaya asal, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Komunitas ini juga menunjukkan keberhasilan dalam proses integrasi sosial di lingkungan baru. Hubungan yang dibangun dengan kelompok masyarakat lain baik Bali Hindu, masyarakat lokal Lampung, maupun warga transmigran dari Jawa berlangsung dalam suasana toleransi dan saling menghargai. Hal ini menjadikan RT 02/RW 02 SB 15 sebagai contoh nyata dari keberagaman yang dikelola dengan prinsip kebersamaan dan harmoni.

Dari sisi pembangunan, keberadaan fasilitas pendidikan seperti SD Negeri 2 Sakti Buana memperkuat posisi komunitas ini dalam proses transformasi sosial. Pendidikan menjadi sarana penting dalam meningkatkan taraf hidup, memperluas wawasan keagamaan, dan membuka akses sosial ekonomi bagi generasi muda.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transmigrasi masyarakat Bali Islam bukan hanya proses pemindahan fisik dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi juga merupakan proses adaptasi sosial dan kultural yang kompleks. Keberhasilan mereka dalam mempertahankan identitas keagamaan dan budaya, membangun hubungan sosial yang harmonis, serta berkontribusi dalam pembangunan lokal merupakan wujud nyata dari keberhasilan kebijakan transmigrasi dalam konteks masyarakat multikultural.

5.2. Saran

Bagi Pemerintah, penting untuk melanjutkan program pembinaan masyarakat transmigran dengan pendekatan berbasis budaya dan keagamaan, serta memberikan dukungan terhadap pelestarian nilai-nilai lokal yang telah terbukti mampu menciptakan keharmonisan sosial.

Bagi Komunitas Bali Islam, disarankan untuk terus menjaga nilai-nilai toleransi, semangat gotong royong, dan kearifan lokal yang telah diwariskan lintas generasi, serta meningkatkan peran aktif dalam pembangunan desa.

Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian lebih lanjut terkait transmigrasi berbasis agama dan budaya, terutama dalam menelusuri perubahan identitas sosial dan relasi antar komunitas di daerah tujuan transmigrasi dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Erani Yustika. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Desa, K., Tertinggal, P. D., & Transmigrasi, D. A. N. (2015). *Indeks Desa Membangun*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Ahmad Isnaeni, & Kiki Muhamad Hakiki. (2016). *Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun* (Vol. 10, Issue 1).
- Atika Nurwan Indriani. (2022). *Tradisi Upacara Kematian Ditinjau dari Nilai-Nilai Islam dalam Perspektif Interaksi Simbolik pada Masyarakat Karya Maju XII Lampung Barat*.
- Bagaskara, A., Hakiki, K. M., Rohmatika, R. V., Badruzaman, B., & Putra, A. E. (2021). Identitas Kebalian; Rekonstruksi Etnik Bali Dalam Mempertahankan Identitas Pasca Konflik. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 49–74. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.9196>
- Budianto UIN Raden Intan Lampung Indonesia aanbudianto, A. (2024). *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman-SA 4.0 license*. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam
- Budi Susetyo. (2023). *Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis*.
- Daniarta Sukarno, T., Aldha, N., Siregar, M., & Yustina, F. (2023). TRANSPOLITANT: DEVELOPMENT POLICY FUTURE TRANSMIGRATION. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 1). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Dendi Ari Sulendra, Husnul Mu'amalah, & Saryati Purwanigara. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Bediom Rumah Adat Masyarakat Lampung Barat. *Bustanul Ulum Journal of Islamic Education*, 1(1), 16–29. <https://doi.org/10.62448/bujie.v1i1.4>

- Ence Surahman, Adri Satrio, & Herminarto Sofyan. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jktp/index>
- Fuadul Umam, Nur Wildan Safrudin, & Alanuari, M. A. (2022). *Peran Pentingnya Pendidikan Bagi Masyarakat Lampung Di Era Globalisasi*. 1, 1–11.
<https://journal.unusia.ac.id/index.php/Tunas>
- Himyari Yusuf. (2016). *Nilai-nilai Islam dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung* (Vol. 10, Issue 1).
- Indriana Kartini. (2011). *Dinamika Kehidupan Minoritas Muslim di Bali*.
Islam lampung. (n.d.).
- Legiani, W. H., Lestari, R. Y., Prodi, H., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., Keguruan, F., Pendidikan, I., Sultan, U., Prodi, A. T., Sosiologi, P., & Tirtayasa, A. (n.d.-a). *Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)*.
- Legiani, W. H., Lestari, R. Y., Prodi, H., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., Keguruan, F., Pendidikan, I., Sultan, U., Prodi, A. T., Sosiologi, P., & Tirtayasa, A. (n.d.-b). *Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)*.
- M. Abdul Karim. (2016). Toleransi Umat Beragama di Desa Loloan, Jembrana, Bali (Ditinjau dari Perspektif Sejarah). *Jurnal Studi Keislaman*, 16.
- M. Agus Kurniawan, & Suci Hartati. (2025). *Evolusi Tradisi Cangget: Sastra Lisan Islam Lampung*.
- Margana, Sri., Faisol, Ahmad., & Handayani, Abmi. (2017a). *Pluralisme dan identitas : pengalaman dan pandangan berkebangsaan : kumpulan tulisan seminar sejarah nasional tahun 2017 . jilid 2*. Penerbit Ombak.

- Margana, Sri., Faisol, Ahmad., & Handayani, Abmi. (2017b). *Pluralisme dan identitas : pengalaman dan pandangan berkebangsaan : kumpulan tulisan seminar sejarah nasional tahun 2017 . jilid 2*. Penerbit Ombak.
- Monika Ata, & Agus S. Ekomadyo. (2018). Adaptasi Arsitektur Tradisional Bali Pada Tempat-Tempat Komunal di Desa Balinuraga, Kalianda, Lampung Selatan. In *JULI* (Vol. 2018, Issue 02).
- Muhammad Hafidz Trisdianto. (2024). *Budaya Masyarakat Bali Koga Dalam Hidup MemBali di Lampung Selatan*.
- Nanik Junaidah. (2008). Islam di Lampung 1552-1570. *Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Nanik Junaidi. (2008). *Islam Lampung 1552-1570*.
- Ni Luh Nyoman Seri Malini. (2012). *Kebertahanan Bahasa Bali pada Transmigran Bali di Provinsi Lampung*.
- Nurlaili, L. D. (2024). Transmigrasi Masyarakat Hindu Bali di Seputih Raman Lampung Tengah. *TAMADDUN: Jurnal Ilmu Sosial, Seni, Dan Humaniora*, 2(2), 64–72. <https://doi.org/10.70115/tamaddun.v2i2.188>
- Priyadi, I. (n.d.). *Optimalisasi Peran Daerah Tujuan Guna Mendukung Peningkatan Ekonomi Dan Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi*.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2008). *Sejarah Penelitian Kualitatif*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1574>
- Rinaldi Permana Putra. (2023a). Awal Penyebaran dan Perkembangan Agama Islam di Pulau Bali. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 41–49. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3622>
- Rinaldi Permana Putra. (2023b). Awal Penyebaran dan Perkembangan Agama Islam di Pulau Bali. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 41–49. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3622>

- Rini Dwi Rahayu. (2019). *Studi Etnobotani Pada Proses Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Suku Sunda, Jawa, Dan Bali Di Desa Bumi Daya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan*.
- Rohani Budi Prihatin. (2012). *Revitalisasi Program Transmigrasi Revitalization of Transmigration Program*. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.
- Syafrizal, A. (n.d.). *SEJARAH ISLAM NUSANTARA*.
- Undari Sulung, & Mohamad Muspawi. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5.
- Utami, A., & Pemerintahan, J. I. (n.d.). *RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (STUDI KASUS: KONFLIK SUKU BALI DESA BALINURAGA DAN SUKU LAMPUNG DESA AGOM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)* Oleh.
- Wika Hardika Legiani, Ria Yunita Lestari, & Haryono. (2018). *Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan)*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Lembar Bimbingan Skripsi

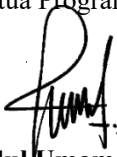
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Wildan Safrudin
 NIM : 2022002
 Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
 Fakultas : Islam Nusantara
 Judul Skripsi : "MASYARAKAT MUSLIM BALI DI LAMPUNG
 (Transmigrasi Masyarakat Bali Muslim di Desa Sakti Buana
 Lampung Pada Tahun 1956 - 2025)"
 Pembimbing : Dr. Ayatullah, M.UD

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Catatan Pimbingan	TTD Pembimbing
1.	05 Oktober 2023	Penentuan judul	Diskusi rasionalisasi pengambilan judul yang tepat	
2.	17 Mei 2024	Gambaran besar judul, pertanyaan, teori, metode, kseimpulan	Penyesuaian judul, Pertanyaan penelitian.	
3.	15 Februari 2025	Bahas pendahuluan, penelusuran penelitian sejarah Islam Lampung	Pembahasan pendahuluan harus mencakup sejarah awal datangnya orang Bali Islam di Lampung.	
4.	27 Februari 2025	Rumusan Masalah, pertanyaan masalah	Unsur pertanyaan sesuaikan dengan prodi kita yaitu ada unsur sejarahnya.	
5.	10 Maret 2025	Teori dan metode penelitian	Penggunaan teori dan metode yang tepat sesuaikan dengan judul besar.	
6.	17 Maret 2025	Pembahasan Sejarah transmigrasi orang Bali Islam di Lampung	Pemaknaan secara umum terkait sejarah transmigrasi dan sejarah Islam Lampung.	
7.	06 Mei 2025	Batasan pembahasan dari tahun 1956-2025	Pembahasan berfokus orang Bali	

			Islam pada tahun 1956-2025	
8.	22 Mei 2025	Biografi dan Antopologi	Menjelaskan konsep tradisi yang dibawakan oleh tokoh setempat dengan melalui teori-teori.	
9.	07 Juli 2025	Proses transmigrasi dan budaya Bali Lampung	Menjelaskan budaya, adat istiadat, dan sejarah transmigrasi Islam Lampung.	

Tanggal Selesai Bimbingan: 07 Juli 2025

Mengetahui, Ketua Program Studi  <u>Fuadul Umam, M.Hum</u>	Pembimbing  <u>Dr. Ayatullah, M.UD</u>
---	--